



**FAKTOR-FAKTOR INTERNAL
KETIDAKTERLAKSANAAN EVALUASI
PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN KONSELING
DI SMP NEGERI 1 UNGARAN**

SKRIPSI

disusun sebagai salah satu syarat penyelesaian studi Strata 1
untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Bimbingan dan Konseling

oleh
Siti Maesyaroh
1301412074
UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2016**

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Internal Ketidakterlaksanaan Ewalusi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 1 Ungaran” ini benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 2 Agustus 2016

PETERAI
KEMPEL

6000

Siti Maesyarah

1301412074

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul Faktor-Faktor Internal Ketidakterlaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 1 Ungaran ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

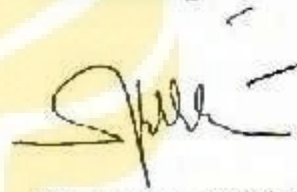
hari : Selasa
tanggal : 2 Agustus 2016

Pembimbing I



Prof. Dr. Sugiyo, M.Si.
NIP 19611201 198601 1 001

Pembimbing II



Dr. Awalya, M.Pd., Kons.
NIP 19601101 198710 2 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling



Des. Eko Nisantoro, M.Pd., Kons.
NIP 19600205 199802 1 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Faktor-Faktor Internal Ketidakterlaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 1 Ungaran ini telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada tanggal 2 Agustus 2016.

Panitia:

Ketua



Dr. Edy Purwanto, M.Si.
NIP 19630121 198703 1 001

Sekretaris



Mulawarman, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NIP 19771223 200501 1 001

Penguji I



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Drs. Eko Nusantoro, M.Pd., Kons.
NIP 19600205 199802 1 001

Penguji/Pembimbing II



Prof. Dr. Suglyo, M.Si.
NIP 19611201 198601 1 001

Penguji/Pembimbing III



Dr. Awalya, M.Pd. Kons.
NIP 19601101 198710 2 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Keterlaksanaan evaluasi itu didukung oleh adanya pengetahuan, persepsi, dan tanggung jawab dari seorang konselor.” (Siti Maesyaroh)



Persembahan

Seiring rasa syukur dan atas ridho-Nya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

*Almamater Jurusan Bimbingan dan Konseling
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri
Semarang*

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Internal Ketidakterlaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 1 Ungaran”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor internal yang menyebabkan tidak terlaksananya evaluasi pelaksanaan BK.

Fokus dalam penelitian ini adalah faktor-faktor internal ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK di SMP Negeri 1 Ungaran yang berupa pengetahuan, persepsi, tanggung jawab, dan komitmen konselor. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa faktor internal yang menentukan tidak terlaksananya evaluasi pelaksanaan BK adalah pengetahuan, persepsi, dan tanggung jawab. Sedangkan faktor komitmen tidak berpengaruh terhadap ketidakterlaksanaan evaluasi.

Skripsi ini dapat terwujud atas bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh studi di Universitas Negeri Semarang.
2. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin penelitian untuk penyelesaian skripsi ini.

3. Drs. Eko Nusantoro, M.Pd., Kons. Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang sekaligus Dosen Penguji Utama yang telah memberikan bimbingan untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Sugiyo, M.Si. Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Dr. Awalya, M.Pd., Kons. Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan untuk kesempurnaan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Bimbingan dan Konseling yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
7. Keluarga Besar SMP Negeri 1 Ungaran yang telah membantu peneliti melaksanakan penelitian ini.
8. Orang tua dan adikku tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dorongan semangat.
9. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang angkatan 2012/2013.
10. Sahabat-sahabatku yaitu Nurul, Arfi, Illaria, Syifa, Nurma, Waffi, Yenni, Syafrina, Siska, mas Reza, mas Rizqi, mas Ucup, dan seluruh penghuni Tasmania Kost yang selalu menjadi penyemangat dan tempat berdiskusi.
11. Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Maesyaroh, Siti. 2016. Faktor-Faktor Internal Ketidakterlaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 1 Ungaran. Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 1 Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. Sugiyo, M.Si. dan Pembimbing II Dr. Awalya, M.Pd., Kons.

Kata kunci: Faktor internal, evaluasi, bimbingan dan konseling.

Evaluasi merupakan suatu proses penilaian. Evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling diartikan sebagai proses pemberian nilai terhadap keberhasilan dan kebermanfaatan pelayanan bimbingan dan konseling yang dilakukan melalui tahap-tahap tertentu guna pengambilan keputusan terkait dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Evaluasi ini penting dalam manajemen program bimbingan. Pelaksana kegiatan evaluasi adalah guru bimbingan dan konseling. Tetapi, fenomenanya guru bimbingan dan konseling cenderung tidak melaksanakan evaluasi. Hal ini disebabkan karena faktor eksternal dan internal. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara objektif, mendalam, dan menyeluruh mengenai faktor-faktor internal ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Ungaran.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini di SMP Negeri 1 Ungaran. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru bimbingan dan konseling, kepala sekolah, dan siswa SMP Negeri 1 Ungaran. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data yang digunakan adalah ketekukan pengamatan disertai triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis datanya menggunakan model analisis interaktif oleh Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan, persepsi, dan tanggung jawab guru bimbingan dan konseling relatif rendah, sedangkan komitmen guru bimbingan dan konseling relatif tinggi. Simpulan dari penelitian ini adalah faktor internal ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Ungaran meliputi pengetahuan, persepsi, dan tanggung jawab. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong guru bimbingan dan konseling melaksanakan evaluasi adalah dengan penyelenggaraan kegiatan pelatihan tentang evaluasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.3.1 Manfaat Teoritis	9
1.3.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Sistematika Skripsi	10
1.5.1 Bagian Awal Skripsi	10
1.5.2 Bagian Isi Skripsi	10
1.5.3 Bagian Akhir Skripsi	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling	15
2.2.1 Pengertian Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling	16
2.2.2 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling	18
2.2.3 Manfaat Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling	20
2.2.4 Jenis Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling	22
2.2.4.1 Layanan Orientasi	23
2.2.4.2 Layanan Informasi	23
2.2.4.3 Layanan Penempatan dan Penyaluran	24

2.2.4.4 Layanan Penguasaan Konten	25
2.2.4.5 Bimbingan Kelompok	25
2.2.4.6 Konseling Kelompok	26
2.2.4.7 Konseling Perorangan (Individual)	27
2.2.4.8 Layanan Konsultasi	27
2.2.4.9 Layanan Mediasi	28
2.2.5 Prinsip Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling	29
2.2.6 Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling	30
2.2.7 Model Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling	32
2.3 Faktor-Faktor yang Menentukan Ketidakterlaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling	33
2.3.1 Faktor Eksternal	33
2.3.1.1 Kriteria	33
2.3.1.2 Alat/Instrumen	34
2.3.1.3 Pelatihan dan Penataran	34
2.3.1.4 Waktu	35
2.3.1.5 Biaya	35
2.3.1.6 Latar Belakang Pendidikan	36
2.3.1.7 Dukungan Kepala Sekolah	36
2.3.1.8 Kebijakan Sekolah	37
2.3.2 Faktor Internal	39
2.3.2.1 Pengetahuan	39
2.3.2.1.1 Konsep Pengetahuan dalam Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling	40
2.3.2.1.2 Indikator Konselor yang Memiliki Pengetahuan dan Keterampilan dalam Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling	41
2.3.2.2 Persepsi	43
2.3.2.2.1 Pengertian Persepsi	43
2.3.2.2.2 Indikator Konselor yang Memiliki Persepsi Positif terhadap Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling	44
2.3.2.3 Tanggung Jawab	45
2.3.2.3.1 Konsep Tanggung Jawab dalam Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling	45
2.3.2.3.2 Indikator Konselor yang Bertanggung Jawab dalam Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling	47
2.3.2.4 Komitmen	49
2.3.2.4.1 Pengertian Komitmen dalam Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling	49
2.3.2.4.2 Indikator Guru BK yang Memiliki Komitmen dalam Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling	50
2.4 Kerangka Pemecahan Masalah	52
BAB 3 METODE PENELITIAN	56
3.1 Jenis Penelitian	56
3.2 Tempat Penelitian	58

3.3 Sumber Data	59
3.4 Teknik Pengumpulan Data	60
3.4.1 Wawancara	60
3.4.2 Observasi	63
3.4.3 Dokumentasi	64
3.5 Teknik Pengujian Keabsahan Data	65
3.6 Teknik Analisis Data	69
3.6.1 Pengumpulan Data (Data Collection)	70
3.6.2 Reduksi Data (Data Reduction)	76
3.6.3 Penyajian Data (Data Display)	74
3.6.4 Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)	74
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	83
4.1 Hasil Penelitian	83
4.1.1 Pengetahuan Guru Bimbingan dan Konseling	83
4.1.2 Persepsi Guru Bimbingan dan Konseling	89
4.1.3 Tanggung Jawab Guru Bimbingan dan Konseling	92
4.1.4 Komitmen Guru Bimbingan dan Konseling	96
4.2 Pembahasan	99
4.2.1 Pengetahuan Guru Bimbingan dan Konseling	100
4.2.2 Persepsi Guru Bimbingan dan Konseling	102
4.2.3 Tanggung Jawab Guru Bimbingan dan Konseling	105
4.2.4 Komitmen Guru Bimbingan dan Konseling	107
4.3 Keterbatasan Penelitian	108
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN	110
5.1 Simpulan	110
5.2 Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	117

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Rangkuman Penelitian	77
Tabel 3.2 Poin-Poin Pengumpulan Data	79
Tabel 3.3 Kategori Data dan Kode Data	81
Tabel 3.4 Reduksi Data Faktor Internal Ketidakterlaksanaan Evaluasi Pelaksanaan BK di SMP Negeri 1 Ungaran	81



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Sistematika Kerangka Pemecahan Masalah	63
Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif (Miles dan Huberman)	78



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kisi-Kisi Wawancara	118
Lampiran 2 Kisi-Kisi Observasi	123
Lampiran 3 Kisi-Kisi Dokumentasi	126
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	127
Lampiran 5 Pedoman Observasi	134
Lampiran 6 Pedoman Dokumentasi	136
Lampiran 7 Catatan Lapangan Wawancara	137
Lampiran 8 Catatan Lapangan Observasi	226
Lampiran 9 Catatan Lapangan Dokumentasi	235
Lampiran 10 Data Hasil <i>Coding</i> Wawancara	238
Lampiran 11 Dokumentasi	250
Lampiran 12 Lembar Penilaian Validator Ahli	254
Lampiran 13 Surat Keterangan Penelitian	260
Lampiran 14 Bukti Fisik Studi Dokumen	261



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya telah menjelaskan beberapa tugas seorang guru Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah. Pada pasal 4 disebutkan bahwa tugas pokok konselor sekolah adalah menyusun program BK, melaksanakan program BK, mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan, dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan melihat berbagai tugas pokok guru BK di atas, maka diketahui bahwa pemberian layanan BK bagi peserta didik sejatinya telah dipersiapkan sejak awal, yaitu ketika menyusun program BK.

Program BK ini disusun oleh guru BK pada awal tahun pelajaran untuk selanjutnya diaplikasikan di sekolah tempat ia bertugas. Perencanaan kegiatan BK mengacu pada program tahunan yang telah dijabarkan ke dalam program semesteran, bulanan, dan mingguan (Sugiyono, 2011: 73). Melalui program ini guru BK akan lebih mudah dalam memberikan layanan BK, karena semua hal yang diperlukan telah tercantum dalam program tersebut seperti topik atau materi yang akan disampaikan, waktu dan tempat pemberian layanan, serta perangkat dan media bimbingan yang akan digunakan.

Melalui penyusunan program BK di sekolah, pemberian layanan BK diharapkan mampu terlaksana dengan lebih riil dan prosedural, serta mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan lebih optimal. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sugiyo (2011: 48) bahwa tujuan penyusunan program tidak lain agar kegiatan BK di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif, dan efisien, serta hasil-hasilnya dapat dinilai. Dengan demikian, akan meningkatkan public trust yaitu kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan BK itu sendiri.

Meskipun telah dirancang dan disusun dengan baik dan spesifik, proses penyelenggaraan program BK di lapangan disinyalir akan tetap mengalami berbagai hambatan, baik dalam intensitas kecil maupun besar. Hambatan-hambatan tersebut dapat bersumber dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal).

Guna menanggapi berbagai hambatan yang mungkin telah terjadi selama proses penyelenggaraan BK di sekolah mulai dari tahap persiapan dan perencanaan, tahap pelaksanaan, serta tahap pasca pelaksanaan, maka perlu dilakukan upaya-upaya tertentu. Salah satu bentuk upayanya adalah dengan melaksanakan penilaian atau evaluasi program BK. Mashudi (2013) mengungkapkan bahwa evaluasi program BK merupakan suatu usaha untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan BK, demi peningkatan mutu program BK yang terwujud dalam bentuk usaha penelitian sistematis, dimana hasil kesimpulan yang diperoleh secara objektif kemudian ditafsirkan dan digunakan

dalam menyusun rencana-rencana perbaikan, pengembangan, dan pengarahan staf.

Penilaian merupakan langkah penting dalam manajemen program bimbingan (Wardati dan Jauhar, 2011: 37). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan program BK itu sangat penting dan perlu dilakukan untuk membantu guru BK maupun stakeholder dalam mengetahui apakah program yang dilaksanakan tersebut telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Selain itu, melalui adanya evaluasi program BK juga dapat diketahui tingkat keefektifan program, sejauh mana kepuasan stakeholder terhadap program BK, dan sebagainya. Sehingga akan menunjang kemajuan pendidikan pada umumnya.

Badrujaman (2014: 7) menjelaskan bahwa guru BK sebagai evaluator dituntut memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memilih dan mendesain evaluasi terhadap layanan yang diselenggarakan kepada siswa. Dengan demikian, idealnya evaluasi pelaksanaan program BK dilakukan oleh evaluator, yaitu guru BK itu sendiri. Penyelenggaraan evaluasi program BK setidaknya dilakukan satu kali dalam satu periode tertentu. Evaluasi ini dapat dilakukan pada saat program masih berlangsung (formatif) maupun saat program telah selesai (sumatif). Dengan melihat sistem pendidikan di Indonesia, evaluasi program BK cenderung dilaksanakan pada akhir periode pembelajaran atau yang biasa disebut akhir tahun pembelajaran.

Salah satu bentuk evaluasi yang sering dijumpai adalah evaluasi pada akhir proses pemberian layanan. Misalnya saja ketika guru BK memberikan instrumen layanan segera (laiseg) untuk selanjutnya diisi oleh sasaran layanan

(siswa), ataupun dengan menanyakan UCA yaitu *understanding* (pemahaman), *comfortable* (perasaan), dan *action* (rencana tindakan yang akan dilakukan) oleh siswa tersebut. Kegiatan tersebut sudah termasuk dalam bagian evaluasi pelaksanaan BK. Selain itu, guru BK juga dapat menggunakan instrumen layanan jangka pendek (*laijapen*) dan instrumen layanan jangka panjang (*laijapang*).

Akan tetapi, fenomena yang muncul justru berkebalikan dengan kondisi yang seharusnya. Guru BK di sekolah cenderung tidak melaksanakan evaluasi, baik evaluasi hasil maupun evaluasi proses. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti terhadap 3 orang guru BK di SMP Negeri 1 Ungaran. Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa di sekolah tersebut tidak dilakukan evaluasi pelaksanaan BK secara sistematis dan menyeluruh pada setiap komponen. Guru BK di sana juga tidak memberikan instrumen *laiseg* maupun menanyakan UCA kepada peserta didik setelah pemberian layanan. Evaluasi hanya dilakukan dengan cara tanya jawab antar guru BK saja.

Salah satu guru BK mengungkapkan adanya perbedaan antara teori yang terdapat di bangku perkuliahan dengan keadaan di lapangan. Guru BK yang seyogyanya menghindari rangkap tugas di organisasi sekolah, justru dibebani tugas ganda. 2 guru BK di SMP Negeri 1 Ungaran mengalami rangkap tugas, yaitu sebagai sebagai Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) dan bendahara sekolah. Dalam mengemban tugas utamanya untuk melayani siswa saja, waktu yang dimiliki guru BK telah banyak tersita. Sehingga guru BK tersebut merasa kurang memiliki waktu yang memadai untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan BK.

Menurut pemaparan guru BK tersebut, jumlah personil BK di sekolah juga berbanding terbalik dengan jumlah siswa yang dibebankan kepada masing-masing guru BK. Menurut SKB Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 0433/P/1993 menyebutkan rasio siswa yang dibimbing oleh guru BK antara 150–225. Akan tetapi, seorang guru BK di SMP Negeri 1 Ungaran mengampu 282 siswa atau 8 kelas setiap tahunnya. Sehingga semakin menyita waktu guru BK di sana.

Penelitian Riswani (2011) yang berjudul Pelaksanaan Evaluasi Layanan Bimbingan dan Konseling menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi layanan BK dapat dikatakan belum maksimal. Kondisi ini pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti latar belakang guru BK yang sangat bervariasi, waktu dan tenaga guru BK yang telah terserap habis untuk mengelola kegiatan rutin BK, minimnya pengalokasian dana untuk program BK, serta belum tersedianya alat-alat atau instrumen evaluasi program BK yang valid.

Apabila kondisi di atas dibiarkan saja, maka dampak yang muncul adalah semakin tidak terstrukturinya pelayanan BK di sekolah. Hal ini senada dengan pernyataan Johnson, dalam Schmidt (2008: 258) bahwa *without accountable performance, promoting the professional identity of school counseling is just 'smoke and mirrors'*. Tanpa adanya pelaporan hasil evaluasi BK, maka akan mempengaruhi public trust dan kemartabatan guru BK. Selain itu, sangat dimungkinkan bahwa guru BK tidak akan memiliki bahan pertimbangan untuk memperbaiki atau memperbaharui programnya. Kondisi ini dipicu oleh guru BK yang telah berada pada zona nyamannya, sehingga kecil kemungkinan untuk melakukan perubahan terkait program yang telah disusunya tersebut.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tidak terlaksananya evaluasi pelaksanaan BK di sekolah. Pemilihan faktor-faktor internal sebagai variabel penelitian didasarkan pada kondisi di SMP Negeri 1 Ungaran bahwa pelaksana evaluasi pelaksanaan BK di sekolah dibebankan kepada guru BK itu sendiri. Selain itu, dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan BK, guru BK cenderung didorong oleh faktor-faktor internal dari dalam dirinya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian kualitatif deskriptif guna mengungkap lebih mendalam mengenai Faktor-Faktor Internal Ketidakterlaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 1 Ungaran.

Pemilihan SMP Negeri 1 Ungaran sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, SMP Negeri 1 Ungaran merupakan sekolah favorit di kabupaten Semarang, sehingga pelayanan BK diharapkan dapat maksimal serta adanya kegiatan evaluasi pelaksanaan BK diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan BK. Kedua, SMP Negeri 1 Ungaran awalnya merupakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang kemudian berubah menjadi sekolah negeri, sehingga memiliki standar yang tinggi dalam memberikan pelayanan BK serta diharapkan dapat melaksanakan kegiatan evaluasi BK guna peningkatan pelayanan tersebut. Ketiga, adanya kesesuaian antara hasil pengambilan data awal di SMP Negeri 1 Ungaran dengan fokus penelitian.

Penelitian kualitatif deskriptif ini digunakan untuk mengungkap kondisi sebenarnya yang melatarbelakangi ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK

oleh guru BK di SMP Negeri 1 Ungaran. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu guru BK mengetahui faktor-faktor internal apa saja yang mempengaruhi ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK di sekolah. Sehingga kedepannya dapat membuat perencanaan yang lebih riil dan prosedural terkait dengan evaluasi pelaksanaan BK di sekolah. Selain itu, juga dapat membantu kepala sekolah dalam memberikan rekomendasi kepada instansi terkait, guna menentukan kebijakan-kebijakan demi terlaksananya evaluasi pelaksanaan BK yang baik dan benar sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK di SMP Negeri 1 Ungaran. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pengaruh pengetahuan guru BK terhadap ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK di SMP Negeri 1 Ungaran?
- 2) Bagaimanakah pengaruh persepsi guru BK terhadap ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK di SMP Negeri 1 Ungaran?
- 3) Bagaimanakah pengaruh tanggung jawab guru BK terhadap ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK di SMP Negeri 1 Ungaran?

- 4) Bagaimanakah pengaruh komitmen guru BK terhadap ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK di SMP Negeri 1 Ungaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mencari dan mengeksplorasi secara mendalam mengenai faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK di SMP Negeri 1 Ungaran. Adapun tujuan khusus dari penyelenggaraan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan guru BK terhadap ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK di SMP Negeri 1 Ungaran.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh persepsi guru BK terhadap ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK di SMP Negeri 1 Ungaran.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh tanggung jawab guru BK terhadap ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK di SMP Negeri 1 Ungaran.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh komitmen guru BK terhadap ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK di SMP Negeri 1 Ungaran.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu mengungkap dan mengeksplorasi mengenai faktor-faktor internal yang menentukan ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK di SMP Negeri 1 Ungaran. Serta digunakan dalam mengembangkan kajian teori lebih lanjut mengenai faktor-faktor internal yang menentukan ketidakterlaksanaan evaluasi pelayanan BK di sekolah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praksis dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Jurusan Bimbingan dan Konseling, diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan seminar dan workshop (pelatihan) mengenai evaluasi pelaksanaan BK, guna membantu guru BK di sekolah dalam memahami tentang pentingnya evaluasi dan manfaat pelaksanaan evaluasi tersebut.
- 2) Bagi kepala sekolah, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi guru BK di sekolah, demi terlaksananya evaluasi pelaksanaan BK yang baik dan benar sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Bagi guru BK, diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan evaluasi diri untuk memahami dan mengetahui secara riil mengenai faktor-

faktor internal yang menentukan ketidaklaksanaan evaluasi pelaksanaan BK di sekolahnya.

1.5 Sistematika Skripsi

Di dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

1.5.1 Bagian Awal Skripsi

Bagian ini berisi halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan, halaman motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

1.5.2 Bagian Isi

Bab 1 pendahuluan membahas tentang gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang pemilihan judul, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan garis besar sistematika skripsi.

Bab 2 berisi kajian teori yang melandasi judul skripsi dan akan membahas penelitian terdahulu, konsep evaluasi pelaksanaan BK, faktor-faktor internal ketidaklaksanaan evaluasi pelaksanaan BK, serta kerangka pemecahan masalah.

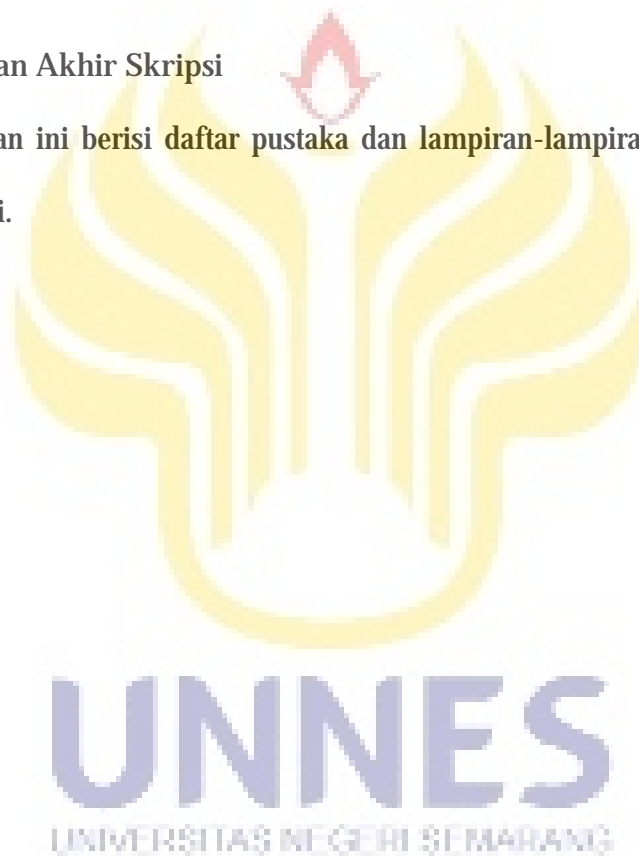
Bab 3 menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri atas jenis penelitian, tempat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab 4 menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor-faktor internal ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK di SMP Negeri 1 Ungaran, serta keterbatasan dalam penelitian ini.

Bab 5 merupakan interpretasi atau simpulan dari pembahasan penelitian dan saran-saran yang diberikan oleh peneliti.

1.5.3 Bagian Akhir Skripsi

Bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung penelitian ini.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai penelitian terdahulu dan teori-teori yang mendukung penelitian ini. Tinjauan pustaka yang melandasi penelitian tentang faktor-faktor internal ketidaklaksanaan evaluasi pelaksanaan BK di SMP Negeri 1 Ungaran ini meliputi konsep evaluasi pelaksanaan BK, faktor-faktor yang menentukan evaluasi pelaksanaan BK, dan kerangka pemecahan masalah.

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada bagian penelitian terdahulu ini berisikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan mendapatkan hasil yang empiris ini, tujuannya adalah sebagai bahan masukan bagi peneliti pemula untuk membandingkan antara penelitian yang satu dengan yang lain.

Penelitian pertama, dilakukan oleh Sahin (2009) yang berjudul “*The Evaluation of Counseling and Guidance Services Based on Teacher Views and Their Prediction Based on Some Variables*” memfokuskan pada evaluasi pelayanan BK dilihat dari aspek staf pengajar (guru) pada tingkat dasar dan menengah. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas pelayanan BK hanya mencapai taraf 46%. Padahal layanan yang ditawarkan dalam program BK tersebut terdiri dari layanan konsultasi, layanan konseling individu, layanan

informasi, layanan orientasi, layanan penempatan, dan layanan konseling keluarga. Pencapaian tersebut dirasa masih sangat rendah, mengingat begitu banyaknya jenis layanan yang ditawarkan dalam program tersebut. Temuan penelitian di atas menunjukkan bahwa proses pemberian layanan BK belum maksimal, sehingga diperlukan perbaikan dan pengembangan guna meningkatkan efektivitas pelayanan BK di sekolah. Tanpa adanya evaluasi layanan BK, tidak akan diketahui adanya kekurangan-kekurangan tersebut. Ini merupakan suatu bukti bahwa evaluasi pelaksanaan BK itu penting.

Penelitian Sahin (2009) tersebut menekankan pada evaluasi layanan BK berdasarkan aspek pengajarnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini difokuskan pada faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan program BK berdasarkan aspek pengetahuan guru BK, persepsi guru BK, tanggung jawab guru BK, dan komitmen guru BK.

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Aunl, et, al, (2014) tentang *“Determinants of Guidance and Counseling Programme in Addressing Student Social Adjustment in Secondary Schools in Siaya District, Kenya”* merupakan penelitian survey. Penelitian ini menunjukkan kurang berkontribusinya program BK dalam membantu penyesuaian sosial siswa. Kondisi ini disebabkan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah dan tidak efektifnya strategi program BK yang digunakan. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pihak sekolah terkait pengadaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang program BK, serta penyelenggaraan kegiatan pelatihan bagi guru BK di sekolah.

Hasil penelitian Aunl, et, al, (2014) tersebut memberikan bukti bahwa kompetensi yang dimiliki guru BK berbanding lurus dengan pelaksanaan program BK. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini merupakan bentuk penelitian lanjutan mengenai hal tersebut. Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor internal penentu ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan program BK, yang meliputi pengetahuan guru BK, persepsi guru BK, tanggung jawab guru BK, dan komitmen guru BK.

Penelitian ketiga, yang dilakukan oleh Riswani (2011) ini berjudul “Pelaksanaan Evaluasi Layanan Bimbingan dan Konseling”. Populasi yang dipilih adalah guru BK se-Kecamatan Rengat Kota. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pelaksanaan evaluasi layanan BK dapat dikatakan kurang maksimal. Kondisi ini pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi latar belakang guru BK yang sangat bervariasi, waktu dan tenaga guru BK yang telah terserap habis untuk mengelola kegiatan rutin BK, minimnya pengalokasian dana untuk program BK, serta belum tersedianya alat-alat atau instrumen evaluasi program BK yang valid.

Penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif tersebut menunjukkan adanya guru BK yang belum melaksanakan evaluasi program BK di sekolah. Keadaan ini dipicu oleh berbagai aspek yang berbeda-beda. Pada lokasi yang berbeda pun dimungkinkan faktor penghambat evaluasinya akan berbeda pula. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan peneliti ini merupakan penelitian lanjutan yang akan difokuskan untuk mengungkap faktor-faktor internal yang menentukan ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK di SMP Negeri 1

Ungaran berdasarkan pada pengetahuan guru BK, persepsi guru BK, tanggung jawab guru BK, dan komitmen guru BK.

Penelitian keempat, yang dilakukan oleh Sudibyo, dkk. (2013) tentang “Model Evaluasi Layanan Informasi Bimbingan dan Konseling Berbasis *Context Input Process Product* (CIPP)” merupakan penelitian R&D dalam pengembangan model evaluasi pada layanan informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru BK sangat membutuhkan panduan evaluasi layanan informasi BK berbasis CIPP, dengan hasil *focus group discussion* yang memperoleh skor rata-rata 3,81. Kondisi tersebut memiliki makna bahwa guru BK di sekolah belum memiliki panduan khusus mengenai evaluasi pelayanan BK, terutama layanan informasi. Disinyalir bahwa kondisi ini merupakan salah satu pemicu tidak terlaksananya evaluasi pelaksanaan BK di sekolah, sehingga diperlukan penelitian lanjutan mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini lebih memfokuskan pada faktor-faktor internal yang mempengaruhi ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan program BK.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

Pada bagian ini peneliti akan mengkaji teori-teori yang menjadi dasar agar lebih memahami mengenai evaluasi pelaksanaan program BK. Beberapa hal yang menjadi kajian adalah pengertian, tujuan, manfaat, jenis, prinsip, prosedur, dan model evaluasi pelaksanaan BK.

2.2.1 Pengertian Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

Evaluasi pelaksanaan BK merupakan suatu bidang kajian yang di dalamnya terdapat dua bidang ilmu. Pertama adalah ilmu mengenai evaluasi dan yang kedua adalah ilmu tentang BK.

Secara harfiah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yakni *evaluation* yang berarti proses penilaian. Secara konseptual, evaluasi merupakan jantungnya suatu perubahan. Tanpa adanya evaluasi ini, suatu organisasi, instansi, program, ataupun kegiatan tidak akan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini disebabkan karena evaluasi pada dasarnya berperan penting dalam memberikan penilaian, perbaikan, dan pengembangan terhadap suatu organisasi, instansi, program, ataupun kegiatan.

Evaluation is the identification, clarification, and application of defensible criteria to determine an object's value (worth or merit) in relation to those criteria (Fitzpatrick, et al, 2004: 5). Maksudnya, evaluasi merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengaplikasikan suatu kriteria terhadap objek tertentu guna memberikan nilai pada objek tersebut. Mashudi (2013) mengungkapkan bahwa evaluasi program BK merupakan suatu usaha untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan BK dengan cara yang sistematis, sehingga diperoleh kesimpulan objektif yang selanjutnya ditafsirkan atau diinterpretasikan guna peningkatan mutu program BK, yaitu melalui adanya langkah-langkah perbaikan, pengembangan, dan pengarahan staf. Sejalan dengan para ahli tersebut, Badrujaman (2014) pun memberikan penekanan terhadap pengertian evaluasi seperti berikut:

- 1) Evaluasi merupakan sebuah proses, maknanya bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat serangkaian prosedur serta tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan.
- 2) Dalam evaluasi terdapat pemberian penilaian, maknanya bahwa evaluasi akan memberikan *value* (nilai) tertentu yang juga berdasarkan pada kriteria tertentu.
- 3) Penilaian dilakukan terhadap keberhargaan dan keberhasilan suatu program. Hal ini menegaskan bahwa evaluasi pelaksanaan program merupakan evaluasi yang menekankan pada keberhasilan yang dicapai oleh program tersebut.
- 4) Evaluasi dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data.
- 5) Hasil evaluasi digunakan untuk pengambilan suatu keputusan yang berdasarkan pada kriteria tertentu. Maknanya bahwa hasil evaluasi pelaksanaan program ini akan menentukan keberlangsungan pelaksanaan program itu sendiri, terkait dengan kontinuitas, perbaikan, ataupun penggantian suatu program.

Dengan kata lain, evaluasi pelaksanaan BK merupakan suatu proses pemberian nilai terhadap keberhasilan dan keberhargaan dalam pemberian layanan BK yang dilakukan melalui tahap-tahap tertentu, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis data guna pengambilan keputusan terkait dengan keberlangsungan pelaksanaan BK itu sendiri. Melalui proses evaluasi ini, maka akan dapat diketahui kelemahan dan kelebihan pelaksanaan layanan BK. Selain

itu, evaluasi pelaksanaan BK dapat diartikan sebagai upaya untuk menilai seberapa jauh ketercapaian pelaksanaan BK itu sendiri.

2.2.2 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

Pada dasarnya, evaluasi program BK memiliki dua tujuan pokok yang tidak dapat dipisahkan. Pertama, evaluasi program BK bertujuan untuk memperbaiki praktik pelaksanaan program BK itu sendiri. Kedua, evaluasi program BK merupakan alat untuk meningkatkan akuntabilitas program BK dimata stakeholder seperti kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, dan lain-lain (Badrujaman, 2014).

Pada sisi untuk memperbaiki pelaksanaan program, evaluasi merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengungkap kelemahan dan kelebihan dalam pelaksanaan program BK. Setelah mengetahui kelemahan dan kelebihan pelaksanaan BK, maka stakeholder akan dapat merencanakan tindakan-tindakan tertentu guna meningkatkan mutu program BK. Sedangkan pada sisi akuntabilitas, evaluasi akan berdampak pada tingkat kepercayaan stakeholder terhadap pelaksanaan BK dan personil-personil yang melaksanakan BK itu sendiri. Hal ini dikarenakan akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan BK di sekolah (Gysbers, 1995).

Selain tujuan umum tersebut, evaluasi pelaksanaan BK juga memiliki tujuan-tujuan khusus seperti mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan BK, mengetahui keberhasilan layanan BK dalam membangun kemandirian siswa, mengetahui tingkat kepuasan siswa dan stakeholder lain

terhadap penyelenggaraan BK di sekolah, mengetahui bagian-bagian dalam pelaksanaan BK yang memerlukan perbaikan, mengetahui aspek-aspek lain yang perlu dimasukkan dalam pelaksanaan program BK, dan sebagainya.

Hal-hal di atas sejalan dengan penjelasan Sugiyo (2011) tentang tujuan diadakannya penilaian BK seperti berikut:

- 1) Meneliti secara periodik pelaksanaan BK. Maksudnya bahwa evaluasi pelaksanaan BK bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pelaksanaan BK pada setiap periodenya.
- 2) Mengetahui jenis-jenis layanan BK yang sudah terlaksana. Evaluasi di sini ditujukan untuk mengungkap jenis-jenis layanan yang telah dilaksanakan oleh guru BK. Dengan hasil tersebut, maka jenis-jenis layanan lain yang belum terlaksana diharapkan dapat dimasukkan dalam pelaksanaan program BK selanjutnya, guna penyempurnaan program tersebut.
- 3) Mengetahui efektivitas metode pelayanan BK yang dilakukan. Dalam hal ini, evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari suatu layanan.
- 4) Mengetahui sejauhmana keterlibatan semua pihak dalam menunjang keberhasilan layanan BK. Dengan mengetahui keterlibatan seluruh stakeholder ini, maka secara tidak langsung juga akan mengetahui cara kerja stakeholder tersebut dalam menunjang keberhasilan pelayanan BK.

- 5) Mengetahui seberapa besar kontribusi BK terhadap tujuan pendidikan yang ditetapkan sekolah. Memberikan pegangan yang kuat dalam mempublikasikan BK. Dengan kata lain, evaluasi bertujuan untuk membantu meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap program BK itu sendiri.
- 6) Memberikan masukan dalam kurikulum sekolah yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dan masalah peserta didik. Program BK pada dasarnya dimulai dengan proses asesmen peserta didik, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan sekolah dapat memfasilitasi penyelesaian masalah yang sedang dihadapi peserta didik tersebut.
- 7) Memberikan informasi tentang bagaimana eksistensi BK kedepan. Dengan demikian pelaksanaan evaluasi bertujuan untuk memprediksi eksistensi BK, karena di masa mendatang BK diharapkan dapat terus berjaya, baik di sekolah maupun di luar sekolah.

2.2.3 Manfaat Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

Secara umum, evaluasi pelaksanaan BK berfungsi untuk membantu stakeholder dalam mengetahui kelebihan dan kelemahan program dan pelayanan BK, ketercapaian program BK, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program BK, dan sebagainya. Hal-hal inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar atau pedoman dalam membuat suatu keputusan tertentu. Keputusan ini berkaitan dengan peningkatan mutu pelaksanaan BK tersebut berikut dengan personil-personil di dalamnya.

Melalui kegiatan evaluasi pelaksanaan BK, evaluator akan mampu mengungkap pencapaian positif atau keberhasilan yang telah diraih dalam pelayanan BK tersebut. Selain itu, evaluasi pelaksanaan BK juga mampu mengungkap kekurangan-kekurangan selama proses pemberian layanan. Penemuan-penemuan ini yang kemudian dijadikan pedoman dalam membuat keputusan, guna peningkatan mutu pelaksanaan BK tersebut. Dengan demikian, diharapkan hal-hal positif yang telah dicapai selama pelaksanaan BK dapat dipertahankan atau digunakan kembali dalam pemberian layanan selanjutnya. Sedangkan hal-hal negatif yang dapat menghambat pelaksanaan BK akan diseleksi, diperbaiki, atau bahkan dihapuskan dari pelaksanaan program BK periode berikutnya.

Hasil evaluasi pelaksanaan BK tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan untuk refleksi diri bagi personil-personil yang terlibat di dalam pelayanan BK. Dengan demikian, evaluasi pelaksanaan program BK berfungsi untuk mendorong para personil BK dalam mengembangkan kompetensi mereka, baik kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, maupun kompetensi profesional. Kondisi ini secara tidak langsung juga akan memberi pengaruh positif terhadap eksistensi BK di masyarakat. Melalui peningkatan mutu tersebut, maka kepercayaan masyarakat diharapkan juga akan meningkat. Sehingga pada di masa mendatang akan semakin banyak dukungan-dukungan positif bagi pelaksanaan program BK.

Penjelasan tentang manfaat evaluasi pelaksanaan BK tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sugiyo (2011: 98) berikut:

- 1) Memberikan informasi bagi pembuatan keputusan pendidikan yang terkait dengan kemadirian peserta didik.
- 2) Mengukur pelaksanaan program BK dengan membandingkan dengan tingkat kemajuan peserta didik atau klien.
- 3) Meningkatkan kualitas layanan BK.
- 4) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan BK di sekolah.
- 5) Mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ketidakberhasilan layanan BK.
- 6) Memberikan umpan balik.
- 7) Meningkatkan pemahaman bagi personil BK untuk selalu meningkatkan diri dalam layanan agar lebih profesional.

2.2.4 Jenis Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

Cobia dan Handerson, dalam Sugiyo, dkk. (2015: 7) menyebutkan bahwa pengembangan program BK dapat dilakukan melalui lima tahap yaitu: (1) diskusi mengenai pengembangan visi, misi, dan tujuan BK, (2) pelaksanaan asesmen kebutuhan siswa, (3) mendesain program BK dalam satu satuan waktu tertentu, (4) implementasi program; (5) evaluasi terhadap pelayanan BK yang telah dilaksanakan. Merujuk pada pendapat tersebut, diketahui bahwa perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan program BK.

Sesuai dengan ketentuan dalam spektrum evaluasi pelaksanaan BK, sebenarnya objek evaluasi itu sangat beragam. Akan tetapi, dalam penelitian ini tidak akan membahas seluruh spectrum evaluasi pelaksanaan BK, karena disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Fokus utama penelitian ini diarahkan pada evaluasi pelaksanaan program BK. Dalam pelaksanaan program BK sendiri terdiri atas berbagai jenis layanan. Adapun jenis-jenis layanan di SMP Negeri 1 Ungaran yang perlu dievaluasi sesuai dengan pola 17 plus, meliputi:

2.2.4.1 Layanan Orientasi

Layanan orientasi merupakan bagian dari layanan BK yang membantu peserta didik memahami lingkungan baru, seperti sekolah dan objek-objek yang dipelajari, dengan tujuan untuk menyesuaikan diri, serta mempermudah dan memperlancar peran peserta didik di lingkungan yang baru tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Supriyo (2010: 10) bahwa layanan orientasi dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru dan atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Hasil yang diharapkan dari layanan ini ialah dipermudahnya penyesuaian diri siswa terhadap pola kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan kegiatan lain yang mendukung keberhasilan siswa (Awalya, 2015: 63).

Pemberian layanan ini berawal dari anggapan bahwa berada di lingkungan baru tidak selalu menyenangkan bagi setiap individu. Oleh karena itu, agar siswa merasa nyaman di lingkungan sekolahnya maka perlu mengenal lebih jauh tentang fasilitas yang tersedia, kurikulum yang digunakan, tenaga pengajar, dan sebagainya. Kegiatan pengenalan tersebut dapat mencegah hal-hal yang dapat menghambat jalannya proses pembelajaran. Dengan demikian, sangat jelas bahwa fungsi utama layanan orientasi ialah fungsi pemahaman dan pencegahan.

2.2.4.2 Layanan Informasi

Layanan informasi adalah layanan yang memberikan informasi seluas-luasnya kepada peserta didik berkaitan dengan kegiatan akademis dan non akademis untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, meliputi bidang pribadi, sosial, belajar, dan karier (Wardati dan Jauhar, 2011: 104). Tujuan

pemberian layanan ini untuk membekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang hal-hal yang berguna dalam mengenali diri dan lingkungannya, sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal. Supriyo (2010: 19) mengungkapkan bahwa tujuan layanan ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga merangsang peserta didik untuk menilai secara kritis tentang gagasan-gagasan, kondisi, dan implikasinya untuk masa sekarang dan mendatang.

Fungsi utama layanan informasi ialah fungsi pemahaman dan pencegahan (Awalya, 2015: 66). Pemahaman yang dimaksudkan di sini berkaitan dengan pendidikan, peminatan dan pekerjaan, kehidupan sosial budaya, dan sebagainya. Dengan demikian, peserta didik dapat merencanakan dan membuat keputusan dengan lebih baik terkait pendidikan, peminatan dan pekerjaan, dan kehidupan sosial budayanya.

2.2.4.3 Layanan Penempatan dan Penyaluran

Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran secara tepat sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan kondisi pribadinya, sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal. Penempatan yang dimaksudkan adalah menempatkan peserta didik pada suatu tempat atau posisi sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki. Sedangkan penyaluran bermakna sebagai upaya sistematis untuk menyalurkan bakat dan potensi peserta didik secara optimal.

Fungsi utama layanan penempatan dan penyaluran ini ialah fungsi pencegahan, pemeliharaan, dan pengembangan. Fungsi pencegahan dimaksudkan untuk mencegah hal-hal yang dapat menghambat dan menyulitkan pengembangan diri peserta didik, karena peserta didik tersebut telah ditempatkan pada posisi yang tepat. Sedangkan fungsi pemeliharaan dan pengembangan dimaksudkan untuk menghasilkan terpelihara dan terkembangkannya bakat, minat, dan kemampuan peserta didik secara optimal.

2.2.4.4 Layanan Penguasaan Konten

Menurut Wardati dan Jauhar (2011: 105) layanan penguasaan konten yaitu layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Konten yang dimaksudkan dalam layanan ini adalah materi-materi layanan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, sosial, belajar, karir, hubungan keluarga, dan keagamaan. Dengan demikian, hasil yang diharapkan dari layanan ini berupa perubahan perilaku yang bersifat positif bagi peserta didik, berkaitan dengan materi layanan yang telah disampaikan oleh guru BK.

2.2.4.5 Bimbingan Kelompok

Bimbingan kelompok merupakan salah satu jenis layanan BK yang dipimpin oleh seorang konselor dan diberikan kepada sejumlah individu, yang membahas topik-topik umum dengan memanfaatkan dinamika kelompok.

Layanan ini memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi pemahaman dan pengembangan. Karena dengan membahas topik-topik tertentu, maka secara tidak langsung akan memberikan pemahaman kepada anggota kelompok (peserta didik) mengenai topik tersebut.

Bimbingan kelompok bertujuan untuk memungkinkan peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari konselor sebagai narasumber maupun dari anggota lain, yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari baik sebagai individu, anggota keluarga dan masyarakat. Pada layanan ini peserta didik diajak untuk mengemukakan pendapat tentang topik yang dibahas. Sehingga terjadi komunikasi antara individu di kelompoknya, kemudian siswa dapat mengembangkan sikap dan tindakan yang diinginkan di dalam kelompok (Awalya, 2015: 72). Secara tidak langsung, kegiatan ini akan melatih kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dan bersosialisasi.

2.2.4.6 *Konseling Kelompok*

Konseling kelompok adalah layanan konseling yang diselenggarakan secara kelompok dengan memanfaatkan dinamika yang ada di dalam kelompok. Dengan kata lain, konseling kelompok merupakan layanan yang diberikan kepada seorang individu untuk mengentaskan masalahnya, melalui pemanfaatan dinamika kelompok dengan dipimpin oleh seorang konselor. Dengan demikian, sangat jelas bahwa fungsi utama layanan konseling kelompok ialah fungsi pengentasan.

Kegiatan konseling kelompok memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membahas dan mengentaskan masalah yang sedang dihadapinya, melalui dinamika kelompok. Bagi peserta didik yang masalahnya sedang dibahas, manfaat yang dapat dipetik sudah tentu pengentasan terhadap masalahnya tersebut. Sedangkan manfaat bagi anggota yang lain yaitu dapat mengambil pelajaran dan nilai-nilai tertentu, melalui pembahasan masalah dalam kegiatan konseling kelompok ini.

2.2.4.7 *Konseling Perorangan (Individual)*

Layanan konseling perorangan yaitu layanan yang diberikan oleh konselor kepada konseli melalui proses wawancara konseling dan tatap muka secara langsung, dengan tujuan untuk membantu mengentaskan masalah yang sedang dihadapi oleh konseli. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Sukardi dan Kusmawati (2008: 62) bahwa konseling perorangan adalah pelayanan BK yang memungkinkan peserta didik (konseli) mendapatkan pelayanan langsung tatap muka (secara perorangan) dengan guru pembimbing (konselor) dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang dideritanya.

Menilik penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi utama layanan konseling perorangan adalah fungsi pengentasan. Melalui proses pembahasan masalah di dalam wawancara konseling, peserta didik dimungkinkan untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya secara mendalam, baik masalah di bidang pribadi, sosial, belajar, karir, hubungan keluarga, maupun

keagamaan. Konselor dan konseli ini kemudian secara bersama-sama akan berupaya mencari alternatif-alternatif penyelesaian dari masalah tersebut.

2.2.4.8 Layanan Konsultasi

Wardati dan Jauhar (2011: 106) menuturkan bahwa layanan konsultasi yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik. Dengan kata lain, layanan ini merupakan bantuan yang diberikan oleh guru BK sebagai konsultan kepada konseli sebagai konsulti, membahas masalah pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah orang yang merasa dipertanggungjawabkan oleh konsulti, misalnya teman sebaya, orang tua, dan lain-lain. Dengan demikian, layanan ini bertujuan untuk membantu memandirikan konsulti dalam menyelesaikan masalahnya dan mampu menghadapi pihak ketiga yang dipermasalahkanannya tersebut.

2.2.4.9 Layanan Mediasi

Pada dasarnya konsep mediasi berasal dari kata “media” yang berarti perantara atau penghubung. Dalam hal ini, konselor atau guru BK berperan sebagai perantara atau penghubung antara dua pihak atau lebih. Dengan demikian, layanan mediasi adalah layanan yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang mengalami keadaan tidak harmonis/tidak cocok (Awalya, 2015: 78). Tujuan pemberian layanan mediasi adalah membantu peserta

didik dalam menyelesaikan masalahnya dan memperbaiki hubungan antara peserta didik tersebut dengan pihak yang lain.

2.2.5 Prinsip Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

Evaluasi pelaksanaan BK merupakan suatu proses pemberian nilai tertentu pada pelaksanaan BK guna pengambilan suatu keputusan. Keputusan yang diambil ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pelaksanaan BK pada kurun waktu selanjutnya. Oleh sebab itu, penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan BK harus dilaksanakan secara prosedural sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu.

Badrujaman (2014) menyebutkan prinsip-prinsip evaluasi pelaksanaan program BK seperti berikut:

- 1) Evaluasi yang efektif memerlukan pengenalan atas tujuan-tujuan tertentu. Maksudnya bahwa dalam melakukan evaluasi pelaksanaan BK perlu adanya tujuan-tujuan tertentu yang jelas dan spesifik, supaya pelaksanaan evaluasi ini terstruktur dengan baik.
- 2) Evaluasi yang efektif memerlukan kriteria penilaian yang valid. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menentukan kriteria penilaian, perlu mempertimbangkan subjek dan objek yang dinilai.
- 3) Evaluasi yang efektif tergantung pada pelaksanaan pengukuran yang valid terhadap kriteria. Maksudnya, dengan menggunakan alat ukur sama, maka diharapkan hasil evaluasi pelaksanaan BK saat ini akan sama dengan hasil evaluasi pelaksanaan BK pada masa mendatang.

- 4) Evaluasi pelaksanaan program harus melibatkan seluruh pihak yang berpengaruh. Artinya, evaluasi pelaksanaan program BK melibatkan seluruh stakeholder secara aktif dan interaktif.
- 5) Evaluasi pelaksanaan program BK memerlukan umpan balik. Maksudnya bahwa hasil evaluasi diharapkan dapat digunakan sebagai umpan balik penyempurnaan pada pemberian layanan berikutnya.
- 6) Evaluasi pelaksanaan program BK harus memiliki perencanaan yang baik dan dilaksanakan secara terus menerus.
- 7) Evaluasi pelaksanaan program BK menekankan pada kepositifan. Maksudnya, dalam melakukan evaluasi pelaksanaan BK, seorang evaluator diharapkan dapat bersikap positif dan objektif.

2.2.6 Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

Pelaksanaan evaluasi BK di sekolah memerlukan langkah-langkah yang jelas, supaya lebih mudah dalam mengaplikasikannya. Berikut ini merupakan langkah-langkah evaluasi pelaksanaan program BK menurut Sukardi dan Kusmawati (2008):

- 1) Fase Persiapan

Pada tahap ini, kegiatan utamanya adalah mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam evaluasi program BK. Persiapan ini dimulai dengan menentukan tujuan dan kisi-kisi evaluasi. Berikut ini rincian tentang hal-hal yang perlu dilakukan dalam fase ini:

- (1) Terlebih dahulu menetapkan tujuan evaluasi. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan aspek-aspek yang akan diteliti secara spesifik, misalnya saja komponen yang akan diteliti.
- (2) Menentukan kriteria-kriteria yang dapat menunjukkan keberhasilan evaluasi pelaksanaan BK.
- (3) Penetapan alat-alat atau instrumen yang digunakan dalam proses evaluasi, seperti angket atau kuesioner, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan lain-lain.
- (4) Merencanakan prosedur evaluasi dengan jelas dan terperinci.
- (5) Menentukan tim evaluator atau personil-personil yang akan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program BK.
- (6) Merencanakan waktu pelaksanaan evaluasi BK.

2) Fase Persiapan Alat/Instrumen

Dalam tahap kedua ini, evaluator memilih alat-alat atau instrumen evaluasi yang akan digunakan. Kemudian menyusun dan mengembangkan alat-alat evaluasi tersebut dalam item-item yang lebih jelas dan spesifik. Setelah itu, kegiatan yang dilakukan adalah menggandakan alat-alat atau instrumen evaluasi yang akan digunakan tersebut.

3) Fase Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi BK

Pada fase ini, kegiatan yang dilakukan oleh evaluator adalah melaksanakan evaluasi pelaksanaan BK sesuai dengan waktu yang

telah ditetapkan dengan menggunakan instrumen yang telah dirancang sebelumnya.

4) Fase Menganalisis Hasil BK

Dalam fase analisis atau pengelolaan data hasil evaluasi ini, terdapat dua hal penting yang perlu dilakukan seperti berikut:

(1) Melakukan tabulasi terhadap data-data yang telah terkumpul.

(2) Menganalisis hasil pengumpulan data, baik melalui statistik maupun non statistik.

5) Fase Penafsiran (Interpretasi) dan Pelaporan Hasil Evaluasi

Fase penafsiran merupakan tahap akhir evaluasi pelaksanaan program BK. Pada tahap ini evaluator membandingkan hasil analisis data dengan kriteria penilaian keberhasilan. Hasil perbandingan tersebut kemudian diinterpretasikan dengan memakai kode-kode tertentu atau kalimat-kalimat yang kemudian disusun dalam bentuk laporan tertulis.

Laporan hasil evaluasi ini yang kemudian digunakan dalam rangka perbaikan pelayanan BK.

Sedangkan prosedur evaluasi menurut Gibson dan Mitchell (2008: 585) disajikan secara lebih singkat seperti berikut:

- 1) Mengidentifikasi tujuan yang dinilai. Langkah pertama adalah menetapkan variabel atau batasan-batasan dalam pelaksanaan evaluasi.
- 2) Mengembangkan rencana evaluatif. Langkah kedua adalah pengidentifikasian dan pensahihan kriteria yang tepat bagi pengukuran kemajuan pelaksanaan BK.

- 3) Mengaplikasikan rencana evaluasi.
- 4) Menggunakan temuan-temuan.

2.2.7 Model Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

Para pakar evaluasi program telah mengemukakan berbagai macam model evaluasi. Setiap model evaluasi yang dikembangkan, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Model-model evaluasi program tersebut, antara lain sebagai berikut:

2.2.7.1 Model Goal Oriented

Model evaluasi *goal oriented* pertama kali diperkenalkan oleh Railph Tyler pada tahun 1950. Model evaluasi *goal oriented* ini menekankan pada penilaian terkait seberapa jauh ketercapaian dari tujuan program. Pada umumnya, dalam merancang program BK tentu telah ditentukan tujuan-tujuannya, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Model evaluasi ini akan membantu evaluator dalam menilai apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sudah terlaksana dan tercapai dengan baik atau belum. Dengan demikian, evaluator akan membandingkan antara tujuan yang telah ditetapkan dengan tujuan yang dapat dicapai.

Adapun langkah-langkah evaluasi *goal oriented* seperti yang disebutkan oleh Fitzpatrick, et, al, (2004: 72) antara lain:

- 1) *Establish broad goals or objectives.*
- 2) *Classify the goals or objectives.*
- 3) *Define objectives in behavioral terms.*

- 4) *Find situations in which achievement of objectives can be shown.*
- 5) *Develop or select measurement techniques.*
- 6) *Collect performance data.*
- 7) *Compare performance data with behaviorally stated objectives.*

Dengan demikian menurut model evaluasi *goal oriented* ini, apabila tujuan-tujuan spesifik suatu program telah tercapai maka program tersebut dapat dikatakan berhasil.

2.2.7.2 Model Goal Free Evaluation

Model evaluasi yang dikembangkan oleh Michael Scriven pada tahun 1972 ini dapat dikatakan berlawanan dengan model pertama yang dikembangkan oleh Tyler karena fokusnya bukan pada pencapaian tujuan. Model *goal free evaluation* ini memfokuskan pada bagaimana kinerja suatu program dengan cara mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik hal-hal positif (yang diharapkan) maupun hal-hal negatif (yang tidak diharapkan).

Dengan kata lain, model evaluasi ini lebih menekankan pada proses kegiatan yang dilakukan selama program tersebut sedang berlangsung. Proses tersebut meliputi perubahan perilaku yang terjadi sebagai dampak dari program yang diimplementasikan, melihat dampak sampingan baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, dan membandingkannya dengan sebelum pelaksanaan program dilakukan. Namun demikian, model ini tidak lepas sama sekali dari tujuan suatu program, melainkan hanya memperhatikan tujuan umum yang ingin dicapai dalam suatu aktivitas/kegiatan (Sugiyono, 2011: 109).

Model inilah yang akan digunakan sebagai pedoman/panduan dalam penelitian tentang faktor internal ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK ini. Pemilihan model *goal free evaluation* didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, penelitian ini hanya difokuskan pada penilaian kinerja guru BK di SMP Negeri 1 Ungaran dalam evaluasi pelaksanaan BK, yaitu terkait apakah guru BK tersebut melakukan evaluasi atau tidak. Kedua, penelitian ini tidak akan menilai seberapa jauh pencapaian pelaksanaan program BK yang telah dilakukan di sekolah tersebut. Berdasarkan kondisi itu, maka peneliti berpandangan bahwa model *goal free evaluation* ini tepat untuk digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini.

2.2.7.3 Model Formative and Sumative Evaluation

Model evaluasi formatif dan summatif dikemukakan oleh Scriven yang memberikan definisi berbeda mengenai evaluasi. Evaluasi ini merupakan jenis penilaian yang berorientasi pada proses dan hasil (Sugiyono, 2011: 108).

Dalam konteks BK, evaluasi formatif dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan data untuk menentukan keberhasilan atau menilai tentang kelebihan dan kelemahan suatu program ketika program tersebut masih dalam tahapan pelaksanaan dan pengembangan (proses kegiatan sedang berjalan). Tujuan evaluasi formatif adalah merevisi proses pemberian layanan yang sedang dikembangkan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber menggunakan berbagai metode dan alat pengumpulan data.

Sedangkan evaluasi sumatif merupakan evaluasi yang menilai hasil program atau akibat adanya program tersebut. Untuk menentukan efektifitas pelaksanaan program BK, maka evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana capaian hasil. Untuk mengetahui hal tersebut, beberapa informasi dapat digunakan dalam evaluasi sumatif, baik informasi sebelum program dilaksanakan maupun setelah program dilaksanakan.

2.2.7.4 Model *Countenance Evaluation*

Model evaluasi *countenance* ini dikembangkan oleh Stake. Model evaluasi program ini memberikan gambaran pelaksanaan program BK secara mendalam dan mendetail. Tahapan dalam model evaluasi ini terdiri dari masukan (*antecedents*), proses (*transactions*), dan hasil (*outcomes*). Hasil dari evaluasi ini kemudian dijadikan dasar atau pedoman dalam menentukan *judgement* (keputusan/penilaian). Tayibnapis (2008: 22) mengungkapkan bahwa *antecedent*, *transaction*, dan *outcomes* data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan tujuan dengan keadaan sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar absolut untuk menilai manfaat program.

Secara ringkas, pelaksanaan model *countenance* ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara objek evaluasi (dalam hal ini pelayanan BK) dengan kriteria-kriteria tertentu yang telah terstandarisasi, guna mengambil suatu keputusan.

2.2.7.5 Model CIPP Evaluation

Model CIPP ini dikembangkan oleh Stufflebeam, dkk. di Ohio State University pada tahun 1967. CIPP merupakan singkatan dari *Context Input Process Product*.

1) *Context Evaluation* (Evaluasi Konteks)

Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci konteks suatu program dilaksanakan, mengidentifikasi kebutuhan semua individu yang terlibat di dalam program, serta mendesain tujuan dan target dari program.

2) *Input Evaluation* (Evaluasi Masukan)

Evaluasi masukan dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dukungan sistem, sumber daya manusia yang dimiliki, dan sumber material yang dapat menunjang pelaksanaan program.

3) *Process Evaluation* (Evaluasi Proses)

Evaluasi proses dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan program dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap proses implementasi program, serta menyediakan informasi untuk penyusunan program di masa mendatang.

4) *Product Evaluation* (Evaluasi Produk)

Evaluasi produk diselenggarakan untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh program, serta mengetahui sejauhmana luaran yang dihasilkan oleh program tersebut.

Stufflebeam, dalam Badrujaman (2014: 54) berpendapat bahwa evaluasi memiliki tujuan untuk memperbaiki (*to improve*), bukan untuk membuktikan (*to prove*). Dengan demikian evaluasi seharusnya dapat membuat suatu perbaikan, meningkatkan akuntabilitas, serta pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena. Model evaluasi CIPP ini bersifat sistematis dan menyeluruh, yang kemudian diwujudkan dalam empat komponen evaluasi yang juga merupakan tahapan dalam evaluasi. Dengan demikian, model evaluasi CIPP menekankan pada pelaksanaan evaluasi yang disesuaikan dengan komponen-komponen program, yaitu evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses, dan evaluasi hasil.

2.2.7.6 Model Discrepancy Evaluation

Kata *discrepancy* adalah istilah bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia memiliki makna kesenjangan. Model yang dikembangkan oleh Malcolm Provus ini merupakan model yang menekankan pada adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program.

Model evaluasi ini menekankan pada kesenjangan yang sebenarnya merupakan persyaratan umum bagi semua kegiatan evaluasi, yaitu mengukur adanya perbedaan antara yang seharusnya dicapai dengan yang sudah riil dicapai. Selain itu, *discrepancy evaluation* ini memfokuskan pada upaya untuk mengetahui kesenjangan yang ada pada setiap komponen (Sugiyo, 2011: 112).

Adapun langkah-langkah model evaluasi *discrepancy* adalah sebagai berikut:

1) Definisi

Dalam tahap definisi, fokus kegiatan dilakukan untuk merumuskan tujuan, proses atau aktifitas, serta pengalokasian sumber daya dan partisipan untuk melakukan aktivitas dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

2) Instalasi

Selama tahap instalasi, rancangan program digunakan sebagai standar untuk mempertimbangkan langkah-langkah operasional suatu program melalui seperangkat tes.

3) Proses

Pada tahap proses, evaluasi difokuskan pada upaya bagaimana memperoleh data tentang kemajuan para peserta program, untuk menentukan apakah perilakunya berubah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.

4) Produk

Selama tahap produk, penilaian dilakukan untuk menentukan apakah tujuan akhir program telah tercapai atau tidak.

5) Analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*)

Analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*) adalah perbandingan antara hasil-hasil yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan.

2.2.7.7 Model CSE-UCLA Evaluation

Center for Study of Evaluation, University of California in Los Angeles (CSE-UCLA) mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan, dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif (Tayibnapis, 2008: 15).

Adapun tahap-tahap model evaluasi CSE-UCLA adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis kebutuhan, yaitu upaya untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa saja yang telah dipenuhi melalui program tersebut.
- 2) Perencanaan program, yaitu tahap dimana evaluator menganalisis apakah program yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan sasaran program atau tidak.
- 3) Penilaian formatif yang memfokuskan pada keterlaksanaan program.
- 4) Penilaian sumatif yang menekankan pada ketercapaian program.

Dengan demikian, suatu program dikatakan berhasil apabila telah memenuhi seluruh tahapannya secara utuh, yang meliputi analisis kebutuhan, perencanaan program, penilaian formatif, dan penilaian sumatif.

2.3 Faktor-Faktor yang Menentukan Ketidakterlaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

Pada sub bab ini akan dikaji mengenai faktor-faktor yang menentukan evaluasi pelaksanaan BK di sekolah. Faktor-faktor penentu tersebut meliputi faktor eksternal dan internal.

2.3.1 Faktor Eksternal Ketidakterlaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

Faktor eksternal merupakan segala faktor yang berpengaruh pada suatu item atau hal tertentu yang berasal dari luar. Faktor eksternal yang dimaksud ialah aspek-aspek yang berpengaruh terhadap ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan program BK yang berasal dari luar diri guru BK.

Menurut Mashudi (2013) evaluasi BK dihambat oleh beberapa faktor, yaitu: (1) guru BK tidak memiliki cukup waktu, (2) pelaksana BK memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi, (3) belum tersedianya alat dan instrumen yang valid, reliabel, dan objektif, (4) belum diselenggarakannya penataran, pendidikan, atau pelatihan mengenai evaluasi, (5) penyelenggaraan evaluasi memerlukan waktu dan dana yang banyak, (6) belum adanya guru BK yang ahli dalam bidang evaluasi, serta (7) belum adanya perumusan kriteria keberhasilan evaluasi pelaksanaan BK yang baku. Dengan demikian, faktor-faktor eksternal ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan program BK meliputi:

2.3.1.1 Faktor Kriteria

Kriteria merupakan karakteristik program yang dianggap sebagai basis relevan dan penting untuk melakukan riset evaluasi (Badrujaman, 2014: 21). Dengan demikian, kriteria merupakan tolok ukur utama bagi evaluator dalam melakukan evaluasi. Akan tetapi, Mashudi (2013: 42) mengungkapkan bahwa hingga sampai saat ini belum terdapat perumusan kriteria keberhasilan evaluasi pelaksanaan BK yang tegas dan jelas. Kondisi ini yang kemudian menyulitkan guru BK dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan BK di sekolahnya.

2.3.1.2 Faktor Alat/Instrumen

Faktor lain yang menghambat evaluasi pelaksanaan program BK adalah belum tersedianya alat-alat atau instrumen evaluasi pelaksanaan program BK di sekolah yang valid, reliabel, dan objektif (Sukardi, 2008: 254). Instrumen merupakan alat bantu bagi peneliti atau evaluator dalam memberikan nilai terhadap objek tertentu, dalam hal ini adalah pelaksanaan program BK. Hal inilah yang kemudian menyulitkan guru BK di sekolah dalam memilih dan menggunakan instrumen untuk pelaksanaan evaluasi. Di sisi lain ada diantara guru BK yang belum memiliki kemampuan atau kompetensi dalam merancang dan menyusun instrumen secara mandiri, sehingga ketika pelaksanaan evaluasi BK mereka tidak menggunakan instrumen sama sekali.

2.3.1.3 Faktor Pelatihan dan Penataran

Mashudi (2013: 42) mengungkapkan bahwa belum diselenggarakan penataran, pendidikan, atau pelatihan khusus yang berkaitan tentang pelaksanaan evaluasi program BK pada umumnya, penyusunan dan pengembangan instrumen evaluasi pelaksanaan BK di sekolah. Padahal sejatinya penyelenggaraan penataran, pendidikan, maupun pelatihan khusus tentang evaluasi pelaksanaan BK dapat membantu meningkatkan kemampuan atau kompetensi guru BK dalam melaksanakan evaluasi program BK itu sendiri. Kondisi inilah yang turut berperan atau mempengaruhi ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK di sekolah.

2.3.1.4 Faktor Waktu

Sukardi (2008: 253) mengungkapkan bahwa pelaksana-pelaksana bimbingan di sekolah tidak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program BK. Hal ini disebabkan karena waktu dan tenaga konselor (guru BK) telah terserap habis oleh kesibukan rutin mengelola kegiatan BK (Riswani, 2011: 141). Bahkan ada diantara guru BK yang memperoleh beban tugas ganda yaitu sebagai guru BK sekaligus bendahara sekolah ataupun jabatan fungsional lainnya, sehingga ini semakin menyita waktu guru BK tersebut. Kondisi inilah yang mengakibatkan evaluasi pelaksanaan BK tidak dapat berjalan dengan baik.

2.3.1.5 Faktor Biaya

Hasil penelitian Triyono, Afrizal Sano, dan Fitria Kasih (2013) menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan evaluasi program BK adalah biaya. Pada dasarnya evaluasi program BK memerlukan biaya tersendiri yang cukup mahal, sedangkan dana yang dialokasikan oleh pihak sekolah untuk program BK hanya mampu menutupi pengeluaran untuk sejumlah kegiatan BK yang rutin saja. Terkadang kepala sekolah kurang memiliki cukup keyakinan atau kepercayaan terhadap daya guna atau manfaat dari adanya evaluasi pelaksanaan BK, sehingga ini mendorong terjadinya pertentangan mengenai pengalokasian dana di dalam institusi yang dipimpinnya tersebut.

2.3.1.6 Faktor Latar Belakang Pendidikan

Dalam pelaksanaan BK di sekolah, tidak dapat dipungkiri kemungkinan adanya perbedaan latar belakang pendidikan dari setiap guru BK. Di dalam satu sekolah, antara guru BK yang satu dengan yang lain biasanya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dari sekolah tersebut.

Pelaksana BK memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi, baik ditinjau dari segi jenjang maupun program, sehingga kemampuannya dalam mengevaluasi pelaksanaan program BK pun sangat bervariasi, termasuk dalam menyusun, membekukan, dan mengembangkan instrumen evaluasi (Mashudi, 2013: 41).

Kemampuan yang beragam seperti ini tentu memberi dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah dapat memberi warna yang berbeda guna pengembangan keilmuan BK, sedangkan dampak negatifnya adalah kemungkinan adanya guru BK yang kurang memahami keilmuan BK termasuk proses evaluasi pelaksanaan BK itu sendiri. Dengan demikian, keberagaman latar belakang pendidikan guru BK mempengaruhi proses evaluasi pelaksanaan BK.

2.3.1.7 Faktor Dukungan Kepala Sekolah

Dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan BK, guru BK tidak dapat melakukannya secara mandiri dan terpisah melainkan bersama-sama dalam sebuah tim. Guru BK dapat berbagi beban dengan para stakeholder yang meliputi kepala sekolah, guru, staf karyawan, dan lain-lain.

Rambu-Rambu Penyelenggaraan BK dalam Jalur Pendidikan Formal yang dikeluarkan Mendikbud (2007) juga menjelaskan salah satu tugas kepala sekolah

adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian, dan upaya tindak lanjut pelayanan BK. Dengan demikian, sangat jelas bahwa salah satu peran dan tanggung jawab kepala sekolah berkaitan dengan pengawasan, penilaian, dan supevisi terhadap pelaksanaan program BK di sekolah.

Kepala sekolah adalah individu paling berpengaruh di lingkup sekolah menengah (Gibson dan Mitchell, 2008: 127). Proses pengambilan keputusan, pengembangan kebijakan, dan seluruh kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan berdasarkan pada persetujuan kepala sekolah. Begitu pula pelaksanaan evaluasi BK yang berada di bawah pengawasan kepala sekolah, tentu memerlukan dukungan penuh dari kepala sekolah. Melalui adanya dukungan dan persetujuan kepala sekolah mengenai evaluasi pelaksanaan BK, akan berdampak positif terhadap pengadaan sarana dan prasarana, anggaran dana sekolah, dan sebagainya. Dengan demikian, evaluasi pelaksanaan BK di sekolah akan sulit dilakukan tanpa adanya dukungan dari kepala sekolah.

2.3.1.8 Faktor Kebijakan Sekolah

Manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Usman, 2010: 5). Melalui proses manajemen yang baik dan terstruktur, maka disinyalir bahwa hasil yang diperoleh dari suatu program tersebut juga akan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa manajemen sangat diperlukan bagi keberlangsungan pelayanan BK. Manajemen pelayanan BK

terdiri atas beberapa aspek yang meliputi perencanaan dan pengorganisasian program, pelaksanaan dan pengarahan program, evaluasi, dan supervisi (Awalya, 2015: 120).

Dalam proses manajemen pelayanan BK diperlukan suatu kebijakan. Salah satu personil yang menjadi sumber kebijakan bagi pelaksanaan BK adalah kepala sekolah. Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang digunakan untuk merespon terkait dengan keadaan atau permasalahan penting yang diikuti atau harus diikuti untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Mahanggi, 2014: 18).

Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 143/MPK/1990 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Angka Kredit bagi Jabatan Guru dalam Lingkungan Depdiknas menyebutkan tugas guru BK yang meliputi menyusun program BK, melaksanakan program BK, melaksanakan evaluasi pelaksanaan BK, melaksanakan tindak lanjut pelaksanaan BK, membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan membimbing guru dalam kegiatan proses BK. Dengan demikian, sangat jelas bahwa pemerintah Indonesia telah mengatur evaluasi pelaksanaan BK di sekolah dengan baik dan spesifik. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah seyogyanya mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang pengadaan sarana dan prasarana yang dapat memfasilitasi pelaksanaan program BK, baik saat pra pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan. Ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program BK yang lebih efektif dan efisien.

2.3.2 Faktor Internal Ketidakterlaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

Faktor internal merupakan segala faktor yang berpengaruh pada suatu item atau hal tertentu yang berasal dari dalam. Pada penelitian ini, faktor internal berarti aspek-aspek yang berpengaruh terhadap ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK yang berasal dari dalam diri guru BK.

Badrujaman (2014) menyebutkan faktor-faktor penghambat evaluasi program BK yang meliputi: (1) guru BK tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan, (2) adanya ketakutan guru BK terhadap akuntabilitas, (3) perasaan nyaman guru BK dengan apa yang ada, serta (4) persepsi guru BK bahwa hasil evaluasi sulit diukur. Triyono, Afrizal Sano, dan Fitria Kasih (2013) juga mengungkapkan bahwa faktor internal yang dapat menghambat evaluasi program BK meliputi: (1) pengetahuan dan keterampilan, (2) persepsi, serta (3) tanggung jawab. Berdasarkan pendapat para pakar tersebut, terdapat kesamaan pada beberapa faktor internal yang menghambat evaluasi. Hal ini disinyalir bahwa faktor-faktor tersebut kemungkinan merupakan faktor yang cenderung mendominasi tidak terlaksananya evaluasi pelaksanaan BK di sekolah. Oleh karena itu, peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada faktor-faktor tersebut. Dengan demikian, faktor-faktor internal ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK meliputi: (1) pengetahuan, (2) persepsi, (3) tanggung jawab, dan (4) komitmen.

2.3.2.1 Faktor Pengetahuan

Pada bagian ini akan diuraikan lebih mendalam mengenai konsep pengetahuan guru BK dalam evaluasi pelaksanaan program BK dan indikator-indikator guru BK yang memiliki pengetahuan dalam evaluasi pelaksanaan BK.

2.3.2.1.1 Konsep Pengetahuan dalam Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

Salah satu faktor penghambat evaluasi program BK yang disebutkan oleh Badrujaman (2014: 22) merujuk pada guru BK yang tidak memiliki pengetahuan tentang evaluasi. Pengetahuan mencerminkan kemampuan kognitif seorang karyawan berupa kemampuan untuk mengenal, memahami, menyadari, dan menghayati suatu tugas/pekerjaan (Suhartini, 2015). Dengan demikian, pengetahuan yang dimaksudkan dalam bahasan ini adalah pemahaman guru BK tentang konsep evaluasi pelaksanaan BK.

Pengetahuan guru BK mengenai keilmuan BK, dalam hal ini evaluasi merupakan pedoman utama sebelum guru BK tersebut melaksanakan evaluasi. Notoatmodjo, dalam Yuliasuti (2007) menyebutkan enam tingkatan pengetahuan, yaitu:

- 1) Tahu (*know*) yaitu mengingat kembali (*recall*) materi yang telah dipelajari sebelumnya.
- 2) Memahami (*comprehension*) yaitu suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek atau materi yang diketahui.
- 3) Aplikasi (*aplication*) yaitu kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari pada kondisi yang nyata atau riil.

- 4) Analisis (*analysis*) yaitu kemampuan menjabarkan suatu objek atau materi ke dalam komponen-komponennya.
- 5) Sintesis (*synthesis*) yaitu kemampuan untuk menghubungkan bagian-bagian ke dalam bentuk keseluruhan yang baru.
- 6) Evaluasi (*evaluation*) yaitu kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu objek atau materi.

This purpose of this evaluation is to assess the level of the counselors' contribution to the improvement of the guidance program on the campus and in the district, and the level of their efforts to upgrade their professional skills/knowledge (Gysbers and Handerson, 1988: 293). Pendapat tersebut menjelaskan bahwa melalui evaluasi, maka dapat diketahui sejauh mana kontribusi guru BK dalam pelayanan BK di sekolah. Selain itu, pengetahuan guru BK juga akan meningkat ketika melaksanakan evaluasi BK itu sendiri.

Akan tetapi, Mashudi (2013: 42) mengungkapkan bahwa belum ada guru, konselor, konselor-konselor inti, atau instruktur yang ahli dalam bidang evaluasi pelaksanaan BK di sekolah. Kondisi ini yang menyebabkan tidak terlaksananya evaluasi pelaksanaan BK di lapangan.

2.3.2.1.2 Indikator Guru Bimbingan dan Konseling yang Memiliki Pengetahuan dalam Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

Untuk mengkaji lebih mendalam mengenai guru BK yang memiliki pengetahuan dalam evaluasi pelaksanaan BK, maka diperlukan indikator-indikator tertentu yang dapat mengungkap tentang sosok guru BK tersebut. Indikator ini dapat dirumuskan dengan melihat kajian sebelumnya mengenai pengetahuan guru

BK. Indikator guru BK yang memiliki pengetahuan dalam evaluasi pelaksanaan BK antara lain adalah:

- 1) Guru BK pernah mempelajari materi-materi atau teori-teori tentang konsep evaluasi pelaksanaan BK, yang meliputi pengertian evaluasi, tujuan evaluasi, manfaat evaluasi, jenis evaluasi, prinsip evaluasi, prosedur evaluasi, dan model evaluasi.
- 2) Guru BK mampu memahami konsep evaluasi pelaksanaan BK yang benar, meliputi pengertian evaluasi, tujuan evaluasi, manfaat evaluasi, jenis evaluasi, prinsip evaluasi, prosedur evaluasi, dan model evaluasi.
- 3) Guru BK mampu mengaplikasikan atau menerapkan konsep evaluasi pelaksanaan BK di sekolah. Hal ini dapat dilihat dengan adanya laporan hasil evaluasi pelayanan BK, yang meliputi layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konseling perorangan, konsultasi, dan mediasi yang telah dilaksanakan oleh guru BK.
- 4) Guru BK mampu menganalisis objek dari evaluasi pelaksanaan BK. Hal ini dapat dilihat dengan adanya hasil analisis evaluasi pada layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konseling perorangan, konsultasi, dan mediasi.
- 5) Guru BK mampu melakukan sintesis yaitu menjelaskan hubungan atau keterkaitan antara evaluasi pelaksanaan BK dengan pelayanan BK

itu sendiri. Dengan demikian, guru BK akan memperoleh *value* yang baru berdasarkan pada pemikiran tersebut.

- 6) Guru BK mampu menilai proses evaluasi pelaksanaan BK itu sendiri. Hal ini ditandai dengan kemampuan guru BK dalam menilai kelebihan dan kelemahannya selama proses evaluasi pelaksanaan BK, mulai dari mempersiapkan alat/instrumen evaluasi, melaksanakan kegiatan evaluasi, menganalisis hasil evaluasi, dan melaporkan hasil evaluasi.

2.3.2.2 Faktor Persepsi

Pada bagian ini akan dikaji dan diuraikan lebih mendalam mengenai konsep persepsi, dan indikator guru BK yang memiliki persepsi positif dalam evaluasi pelaksanaan BK.

2.3.2.2.1 Konsep Persepsi

Rakhmat (2009: 51) mengungkapkan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan. Pendapat ini diperkuat oleh pernyataan Sugiyo (2006: 29) bahwa persepsi adalah proses menyimpulkan informasi dan menafsirkan kesan yang diperoleh melalui alat inderawi kita. Pada kenyataannya, persepsi sangat dipengaruhi oleh pengalaman yang ada pada pelaku persepsi (Mar'at dan Kartono, 2006: 10). Dengan demikian, persepsi merupakan suatu proses menyimpulkan dan menafsirkan pesan, objek, peristiwa, maupun pengalaman yang diperoleh melalui inderawi manusia.

Hasil penafsiran inilah yang kemudian mempengaruhi seseorang dalam bertindak atau melakukan sesuatu hal. Menurut Agustina (2012), persepsi dukungan organisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja pegawai. Begitu pula dengan persepsi guru BK tentang evaluasi pelaksanaan BK. Guru BK yang memiliki persepsi positif tentang evaluasi, disinyalir akan berpengaruh positif pula terhadap penerapan atau implementasi evaluasi pelaksanaan BK tersebut.

Akan tetapi, Badrujaman (2014: 22) mengungkapkan tentang adanya guru BK yang memiliki persepsi atau pandangan bahwa hasil program BK itu sulit untuk diukur. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya persepsi negatif terhadap evaluasi pelaksanaan BK. Faktor inilah yang kemudian menghambat pelaksanaan evaluasi BK.

2.3.2.2.2 Indikator Guru Bimbingan dan Konseling yang Memiliki Persepsi Positif terhadap Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

Untuk mengkaji lebih mendalam mengenai guru BK yang memiliki persepsi positif terhadap evaluasi pelaksanaan BK, maka diperlukan indikator-indikator tertentu yang dapat mengungkap hal tersebut. Indikator ini dapat dirumuskan dengan melihat kajian sebelumnya mengenai persepsi guru BK. Indikator guru BK yang memiliki persepsi positif terhadap evaluasi pelaksanaan BK, diantaranya:

- 1) Guru BK memberi perhatian lebih terhadap proses pelaksanaan evaluasi BK di sekolah. Proses evaluasi ini dimulai sejak mempersiapkan alat/instrumen evaluasi, melaksanakan kegiatan

evaluasi, menganalisis hasil evaluasi, hingga melaporkan hasil evaluasi. Selain itu, guru BK yang memiliki persepsi positif terhadap evaluasi pelaksanaan BK akan menjalin komunikasi (berdiskusi) dengan stakeholder terkait evaluasi tersebut.

- 2) Guru BK menyadari pentingnya evaluasi pelaksanaan BK bagi setiap layanan yang dilaksanakannya, yaitu layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konseling perorangan, konsultasi, dan mediasi.
- 3) Guru BK merasa mampu melaksanakan evaluasi pelaksanaan BK dengan baik dan terstruktur. Hal ini didasari adanya kemungkinan guru BK yang merasa malas untuk melaksanakan evaluasi BK, apalagi bagi guru BK yang mengalami rangkap tugas di dalam organisasi sekolah. Dengan adanya persepsi positif yang berupa keyakinan akan kemampuan dalam melakukan evaluasi, maka guru BK tersebut disinyalir akan tetap melaksanakan evaluasi BK meskipun ia mengalami rangkap tugas.

2.3.2.3 Faktor Tanggung Jawab

Pada bagian ini akan dikaji dan diuraikan lebih mendalam mengenai konsep tanggung jawab dalam evaluasi pelaksanaan BK dan indikator guru BK yang memiliki tanggung jawab dalam evaluasi pelaksanaan BK.

2.3.2.3.1 Konsep Tanggung Jawab dalam Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

Hasil penelitian Triyono, Afrizal Sano, dan Fitria Kasih (2013) menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan evaluasi program BK adalah tanggung jawab. Pada dasarnya tanggung jawab merupakan suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Zunaedi, dalam Ulfa (2014: 21) yang mendefinisikan tanggung jawab sebagai sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

Tugas konselor sekolah diantaranya adalah menilai proses dan hasil pelaksanaan pelayanan BK, menganalisis hasil penilaian pelayanan BK, melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian pelayanan BK, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam pelayanan BK secara menyeluruh kepada koordinator BK serta kepala sekolah (Awalya, 2015: 146). Sejalan dengan pernyataan tersebut, Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 84 Tahun 1993 juga menyebutkan bahwa salah satu tugas pokok guru BK adalah mengevaluasi pelaksanaan program BK.

Dengan demikian, evaluasi pelaksanaan BK menjadi salah satu tanggung jawab seorang guru BK di sekolah. Melalui rasa tanggung jawab ini, guru BK dapat lebih termotivasi dalam melaksanakan evaluasi. Akan tetapi tanpa adanya rasa tanggung jawab di dalam dirinya, tentu ini akan menghambat pelaksanaan evaluasi oleh guru BK tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rerung, Brasit,

dan Idayanti (2012) bahwa tanggung jawab memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.

2.3.2.3.2 Indikator Guru Bimbingan dan Konseling yang Bertanggung Jawab dalam Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

Untuk mengkaji lebih mendalam mengenai guru BK yang bertanggung jawab dalam evaluasi pelaksanaan BK, maka diperlukan indikator-indikator tertentu yang dapat mengungkap hal tersebut. Dimulai dengan pendapat Wulandari, dalam Ulfa (2014) yang menyebutkan ciri-ciri orang yang bertanggung jawab seperti berikut:

- 1) Akan senantiasa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Guru BK yang bertanggung jawab dapat dilihat dari ketekunannya dalam melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya, salah satunya ialah melaksanakan evaluasi BK.
- 2) Selalu berusaha menghasilkan sesuatu tanpa rasa lelah dan putus asa. Hal ini dapat diartikan bahwa guru BK yang bertanggung jawab senantiasa melaksanakan kegiatan evaluasi dengan penuh semangat dan tidak berputus asa.
- 3) Selalu berpikir positif di setiap kesempatan dan dalam situasi apapun. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa guru BK yang memiliki tanggung jawab akan selalu berpikir positif dalam kondisi apapun, termasuk saat beban tugasnya sangat banyak.
- 4) Tidak pernah menyalahkan orang lain atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Apabila guru BK melakukan suatu kesalahan dalam

proses evaluasi, guru BK tersebut akan berusaha untuk merefleksi diri dan tidak menyalahkan orang lain.

Berdasarkan pendapat di atas, maka indikator guru BK yang bertanggung jawab dalam evaluasi pelaksanaan BK adalah sebagai berikut:

- 1) Guru BK merupakan seseorang yang senantiasa mengerjakan tugasnya yang berupa evaluasi pelaksanaan BK. Evaluasi ini dilakukan pada setiap pelayanan BK, yaitu layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konseling perorangan, konsultasi, dan mediasi.
- 2) Guru BK senantiasa menjaga semangatnya dalam menyelesaikan laporan evaluasi pelaksanaan BK yang berkaitan dengan layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konseling perorangan, konsultasi, dan mediasi yang telah dilaksanakannya.
- 3) Guru BK adalah sosok yang selalu berpikir positif meskipun beban tugas yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan BK sangat banyak, karena evaluasi dilakukan pada semua layanan yang berupa layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konseling perorangan, konsultasi, dan mediasi. Kondisi ini ditunjukkan dengan sikap guru BK yang tidak mengeluh.
- 4) Apabila guru BK mengalami kesalahan dalam proses mempersiapkan alat/instrumen evaluasi, melaksanakan kegiatan evaluasi, menganalisis

hasil evaluasi, dan melaporkan hasil evaluasi, guru BK tidak akan menyalahkan orang lain. Akan tetapi, sikap yang ditunjukkan adalah melakukan refleksi diri dan memperbaiki kesalahan tersebut.

2.3.2.4 Faktor Komitmen

Pada bagian ini akan diuraikan lebih mendalam mengenai pengertian komitmen dalam evaluasi pelaksanaan BK dan indikator guru BK yang memiliki komitmen dalam evaluasi pelaksanaan BK.

2.3.2.4.1 Pengertian Komitmen dalam Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

Komitmen menurut Porter, Mowday, dan Steers, dalam Syafrizka (2011) diartikan sebagai kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi. Hal ini dapat ditandai dengan tiga hal, yaitu:

- 1) Penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi.
- 2) Kesiapan dan kesediaan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atas nama organisasi.
- 3) Keinginan untuk mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi.

Ivancevich, et, al, (2007: 234) menyebutkan bahwa komitmen terhadap suatu organisasi melibatkan tiga sikap, meliputi: (1) rasa identifikasi dengan tujuan organisasi, (2) perasaan terlibat dengan tugas-tugas organisasi, dan (3) perasaan setia terhadap organisasi. Berdasarkan penjelasan pakar di atas, komitmen dapat dimaknai sebagai dorongan internal yang dimiliki seseorang

dalam menjalankan tugas-tugasnya di suatu organisasi tertentu. Dalam penelitian ini, organisasi yang dimaksudkan adalah organisasi BK di sekolah dengan guru BK sebagai salah satu personil di dalamnya. Dengan demikian, komitmen dalam evaluasi pelaksanaan BK dapat didefinisikan sebagai dorongan internal yang dimiliki oleh seorang guru BK dalam menjalankan tugas-tugasnya di dalam organisasi BK, yang salah satunya berupa pelaksanaan evaluasi program BK.

Alasan pemilihan komitmen sebagai salah satu faktor internal yang mempengaruhi ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK, karena komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pegawai (Sari, 2015). Dengan demikian, guru BK yang memiliki komitmen tinggi terhadap evaluasi pelaksanaan BK disinyalir akan melaksanakan evaluasi dengan baik.

2.3.2.4.2 Indikator Guru BK yang Memiliki Komitmen dalam Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

Guna memahami guru BK yang memiliki komitmen dalam evaluasi pelaksanaan program BK, maka perlu dikaji mengenai indikator-indikator tersebut. Sesuai dengan pernyataan Steers, dalam Syafrizka (2011) yang mengelompokkan komitmen dalam organisasi seperti berikut:

- 1) Identifikasi dengan organisasi yaitu penerimaan terhadap tujuan organisasi, dimana penerimaan ini merupakan dasar komitmen terhadap organisasi yang dinaunginya. Identifikasi guru BK dapat dilihat melalui sikap guru BK tersebut saat menyetujui kebijakan-kebijakan di dalam organisasi BK di sekolah, kesamaan antara nilai

pribadi dan nilai-nilai organisasi BK di sekolah, serta adanya rasa kebanggaan menjadi bagian dari organisasi BK di sekolah.

- 2) Keterlibatan yaitu adanya kesediaan untuk berusaha sungguh-sungguh pada organisasi. Keterlibatan yang dimaksud tentunya sesuai dengan peran dan tanggung jawab pekerjaan di dalam organisasi tersebut. Hal ini bermakna bahwa guru BK yang memiliki komitmen tinggi, akan menerima semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan padanya. Salah satu tugas tersebut ialah menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan BK yang telah dilaksanakan.
- 3) Loyalitas yaitu adanya keinginan yang kuat untuk menjaga keanggotaan di dalam organisasi. Loyalitas terhadap organisasi ini dapat berupa evaluasi terhadap komitmen, serta adanya ikatan emosional dan keterikatan antara organisasi BK di sekolah dengan guru BK. Guru BK dengan komitmen tinggi akan memiliki loyalitas yang tinggi pula. Ini diwujudkan dengan kegiatan evaluasi pelaksanaan BK, guna menjaga keanggotaannya di dalam organisasi BK di sekolah.

Berdasarkan pendapat di atas, maka indikator guru BK yang memiliki komitmen dalam evaluasi pelaksanaan program BK adalah sebagai berikut:

- 1) Guru BK merupakan seseorang yang identik dengan kegiatan evaluasi pelaksanaan BK, yaitu sosok yang mempersiapkan alat/instrumen evaluasi, melaksanakan kegiatan evaluasi, menganalisis hasil evaluasi, dan melaporkan hasil tersebut. Kegiatan ini dilakukan pada setiap pelayanan BK, mulai dari layanan orientasi, informasi, penempatan

dan penyaluran, penguasaan konten, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konseling perorangan, konsultasi, dan mediasi.

- 2) Guru BK terlibat secara langsung dan berpartisipasi aktif dalam setiap pelaksanaan kegiatan evaluasi pelayanan BK, yang meliputi mempersiapkan alat/instrumen evaluasi, melaksanakan kegiatan evaluasi, menganalisis hasil evaluasi, dan melaporkan hasil evaluasi.
- 3) Guru BK menunjukkan loyalitasnya dalam setiap pelaksanaan kegiatan evaluasi pelayanan BK, yang meliputi mempersiapkan alat/instrumen evaluasi, melaksanakan kegiatan evaluasi, menganalisis hasil evaluasi, dan melaporkan hasil evaluasi. Hal ini dapat dilihat dengan sikap partisipasi dan ketekunan yang ditunjukkan guru BK dalam melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan BK di setiap layanan yang diberikan.

2.4 Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan kajian teori yang telah dibahas sebelumnya, diketahui bahwa jenis-jenis evaluasi pelaksanaan BK pada pola 17 plus meliputi layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konseling perorangan, layanan konsultasi, dan layanan mediasi. Karena subjek penelitian ini yaitu guru BK SMP Negeri 1 Ungaran menggunakan pola 17 plus di dalam pelaksanaan programnya, maka penelitian ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan evaluasi layanan-layanan yang terdapat di dalam pola 17 plus tersebut.

Pada dasarnya, di dalam proses evaluasi pelaksanaan program BK terdapat evaluasi pelayanan. Evaluasi pelaksanaan BK ini merupakan bagian penting dalam pelayanan BK di sekolah, karena hasil dari evaluasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya memperbaiki dan mengembangkan pelaksanaan BK itu sendiri. Akan tetapi, kegiatan evaluasi ini sering diabaikan atau tidak dilaksanakan oleh guru BK.

Ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK tersebut dipengaruhi oleh munculnya berbagai hambatan yang bersifat eksternal (dari luar) maupun internal (dari dalam). Faktor penghambat evaluasi pelaksanaan BK yang bersifat eksternal yaitu aspek-aspek penghambat evaluasi pelaksanaan BK yang berasal dari luar diri guru BK. Sedangkan faktor yang bersifat internal yaitu aspek-aspek penghambat evaluasi pelaksanaan BK yang berasal dari dalam diri evaluator (guru BK).

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka fokus penelitian ini adalah faktor-faktor internal ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK. Adapun faktor internal ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK di sekolah meliputi pengetahuan, persepsi, tanggung jawab, dan komitmen. Berikut ini akan dijelaskan keterkaitan faktor-faktor tersebut terhadap ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK:

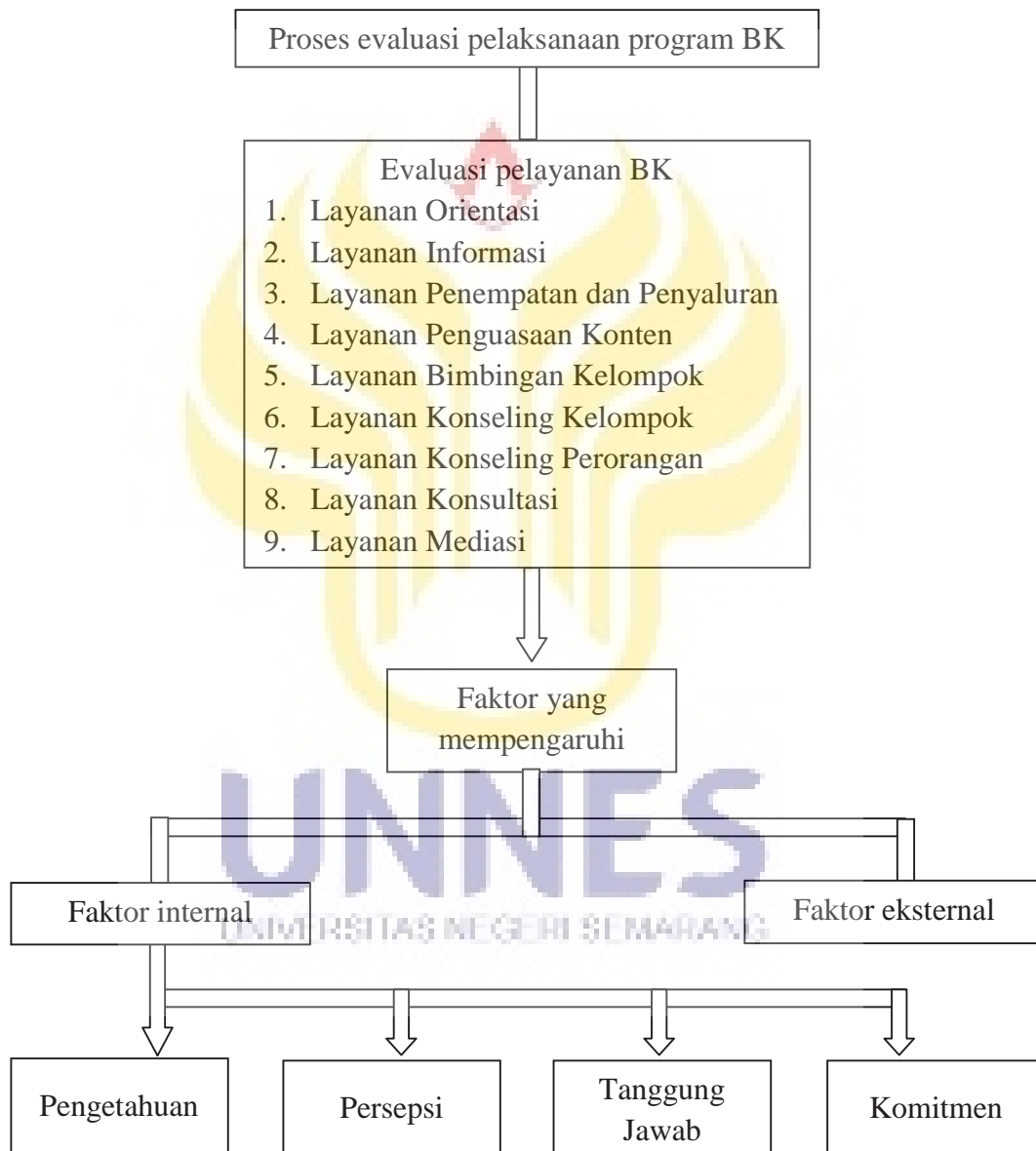
- 1) Pengetahuan merupakan suatu bentuk pemahaman seseorang terhadap materi atau objek tertentu, yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Melalui pengetahuan yang utuh mengenai konsep

evaluasi pelaksanaan BK, guru BK disinyalir juga akan lebih mudah dalam menerapkan kegiatan tersebut di lapangan.

- 2) Persepsi adalah suatu proses menyimpulkan dan menafsirkan pesan, objek, maupun pengalaman yang diperoleh melalui inderawi manusia. Dengan adanya persepsi positif guru BK tentang evaluasi pelaksanaan BK, maka disinyalir akan berpengaruh positif pula terhadap pengaplikasian evaluasi pelaksanaan BK yang dilakukan oleh guru BK tersebut.
- 3) Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan atau menanggung tugas dan kewajibannya. Adanya rasa tanggung jawab dalam diri seseorang akan berpengaruh terhadap pola pikir positif terhadap kegiatan yang dikerjakannya. Dengan demikian, guru BK yang bertanggung jawab diasumsikan akan tetap berpikir positif saat menghadapi tugas yang berupa evaluasi pelaksanaan BK.
- 4) Komitmen merupakan kekuatan atau dorongan internal dari individu dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya di dalam organisasi. Dengan adanya komitmen ini, guru BK disinyalir akan loyal dalam menjalankan tugasnya yang berupa evaluasi pelaksanaan BK.

Menilik pada penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK yang berupa evaluasi layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konseling perorangan, layanan konsultasi, dan layanan mediasi disebabkan adanya faktor-faktor internal yang meliputi

pengetahuan, persepsi, tanggung jawab, dan komitmen. Untuk mempermudah peneliti dalam menjelaskan kerangka pemecahan masalah pada penelitian ini, maka disajikan dalam bentuk Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Sistematika Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian faktor internal ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK di SMP Negeri 1 Ungaran, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pengetahuan guru BK tentang konsep evaluasi pelaksanaan BK relatif rendah, ditandai dengan relatif rendahnya kemampuan konselor dalam memahami, menerapkan, menganalisis, dan menilai proses evaluasi pelaksanaan BK. Maka dari itu, pengetahuan guru BK berdampak pada ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK di SMP Negeri 1 Ungaran.
- 2) Persepsi guru BK tentang evaluasi pelaksanaan BK relatif negatif, ditunjukkan melalui rendahnya kesadaran konselor tentang pentingnya evaluasi pelaksanaan BK dan adanya perasaan tidak sanggup melaksanakan evaluasi BK secara terstruktur. Maka dari itu, persepsi guru BK berdampak pada ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK di SMP Negeri 1 Ungaran.
- 3) Tanggung jawab guru BK dalam evaluasi pelaksanaan BK relatif rendah, ini dilihat dari tidak munculnya indikator ketekunan, semangat, dan pandangan positif guru BK dalam evaluasi pelaksanaan BK. Maka dari itu, tanggung jawab guru BK berdampak pada

ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK di SMP Negeri 1 Ungaran.

- 4) Komitmen guru BK dalam evaluasi pelaksanaan BK relatif tinggi, ditunjukkan dengan munculnya indikator keterlibatan konselor dalam evaluasi pelaksanaan BK dan loyalitas konselor terhadap organisasi BK di sekolah. Maka dari itu, komitmen guru BK tidak berpengaruh terhadap ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK di SMP Negeri 1 Ungaran.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti dapat mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Bagi Jurusan BK FIP Unnes

Dalam penyusunan kurikulum perkuliahan, pihak jurusan BK FIP Unnes diharapkan untuk memperhatikan pentingnya faktor-faktor internal ketidakterlaksanaan evaluasi pelaksanaan BK, guna membantu meningkatkan pengetahuan calon guru BK mengenai evaluasi BK.

- 2) Bagi Kepala Sekolah

Dalam melaksanakan kegiatan supervisi mengenai pelaksanaan BK, kepala sekolah dapat menggunakan acuan tentang pentingnya meningkatkan pengetahuan, persepsi, dan tanggung jawab dari seorang guru BK.

3) Bagi Guru BK

Guru BK membuka wawasan dan pengetahuan mengenai evaluasi pelaksanaan BK. Selain itu guru BK juga mencari referensi-referensi tentang evaluasi BK dan ikut serta dalam kegiatan seminar dan pelatihan mengenai evaluasi BK.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Hartiwi. 2012. Pengaruh Persepsi Dukungan Organisasi (Received Organization Support) terhadap Kinerja Dosen melalui Motivasi Kerja (Studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-STIE Palangka Raya). *Jurnal Sains Manajemen*. 1(1): 15-29. Tersedia di www.digilib.unpar.ac.id [diakses pada 20-6-2016].
- Aunl, Rhoda Topister, et, al. 2014. Determinants of Guidance and Counseling in Addressing Students Social Adjustment in Secondary School in Siaya District, Kenya. *International Journal of Humanities and Social Science*. 4(4): 69–76. Tersedia di www.ijhssnet.com [diakses 23-12-2015].
- Awalya, dkk. 2015. *Bimbingan dan Konseling (Edisi Revisi)*. Semarang: Unnes Press.
- Badrujaman, Aib. 2014. *Teori dan Aplikasi Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Indeks.
- Fitzpatrick, Jody L., James R. Sanders, dan Blaine R. Sanders. 2004. *Program Evaluation*. United States of America: Pearson Education, Inc.
- Gibson, L. Robert dan Marianne H. Mitchell. 2008. *Bimbingan dan Konseling (Edisi Revisi)*. Translated by Yudi Santoso. 2011. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gysbers, Norman C. 1995. Evaluating Guidance Programs. *ERIC Digest*. EDO-CG-95-7 [diakses 13-1-2016].
- Gysbers, Norman C. dan Patricia Henderson. 1988. *Developing and Managing Your School Guidance Program (Edisi Revisi)*. Alexandria: American Association for Counseling and Development.
- Ivancevich, John M, Robert Konopaske, dan Michael T. Matteson. 2005. *Perilaku dan Manajemen Organisasi (Edisi Revisi)*. Translated by Gina Gania. 2007. Jakarta: Erlangga.
- Mahanggi, Dinka Rizky Apriliana. 2014. *Kebijakan Kepala Sekolah terhadap Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri Se-Kabupaten Purbalingga*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Mar'at, Samsunuwiyati dan Lieke Indieningsih. 2006. *Perilaku Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mashudi, Farid. 2013. *Panduan Evaluasi dan Supervisi Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: Diva Press.

- Mendikbud. 1990. Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 143/MPK/1990 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Angka Kredit bagi Jabatan Guru dalam Lingkungan Depdiknas.
- Mendikbud. 1993a. Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 0433/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- Mendikbud. 1993b. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- Mendikbud. 2007. Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, Jalaludin. 2009. *Psikologi Komunikasi (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rerung, Elisabeth Ria, Nurdin Brasit, dan Idayanti. 2012. *Pengaruh Motivasi Kerja, Tanggung Jawab, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Kantor BPS Propinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar*. Tesis. Makassar: Universitas Hasanudin.
- Riswani. 2011. Pelaksanaan Evaluasi Layanan Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Pemikiran Islam*. 39(1): 130–145. Tersedia di <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php> [diakses 8-1-2016].
- Sahin, Fulya Yuksel. 2009. The Evaluation of Counseling and Guidance Services Based on Teacher Views and Their Prediction Based on Some Variables. *International Journal of Instruction*. 2(1): 59-76. Tersedia di www.e-iji.net [diakses 23-12-2015].
- Sari, Widi Purnama. 2015. Pengaruh Disiplin Kerja, Komitmen Organisasi, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana. *Jurnal Manajemen*, p. 1-12. Tersedia di www.digilib.udinus.ac.id [diakses pada 20-6-2016].
- Schmidt, John J. 2008. *Counseling in School (Edisi Revisi)*. United States of America: Pearson Education, Inc.
- Sudibyoy, Hanung, Sugiyo, dan Supriyo. 2013. Model Evaluasi Layanan Informasi Bimbingan dan Konseling Berbasis Context Input Process Product (CIPP). *Jurnal Bimbingan dan Konseling*. 2(1): 55–61. Tersedia di <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jbk> [diakses 22-2-2016].
- Sugiyo. 2006. *Psikologi Sosial*. Semarang: Unnes Press.

- Sugiyono. 2011. *Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Semarang: Widya Karya.
- Sugiyono, Muslikah, dan Abdul Kholiq. 2015. *Pengembangan Instrumen Evaluasi Program Bimbingan Konseling Berbasis Proses di Sekolah Menengah. Laporan Penelitian Unggulan Universitas Negeri Semarang*. Semarang: LP2M Unnes.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartini, Yati. 2015. *Pengaruh Pengetahuan, Keterampilan, dan Kemampuan Karyawan terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Industri Kerajinan di Manding, Bantul, Yogyakarta)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta.
- Sukardi, Dewa Ketut. 2008. *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukardi, Dewa Ketut dan Desak P.E Nila Kusmawati. 2008. *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suprapti, Wulan Martini. 2004. *Pengaruh Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Supriyo. 2010. *Teknik Bimbingan Klasikal*. Semarang: Swadaya Publishing.
- Sutoyo, Anwar. 2012. *Pemahaman Individu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafrizka, Alrendia. 2011. *Hubungan Kepuasan Kompensasi dengan Komitmen Organisasi*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Tayibnapis, Farida Yusuf. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Triyono, Afrizal Sano, dan Fitria kasih. 2013. *Faktor Penghambat Pelaksanaan Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling oleh Guru Bimbingan dan Konseling di SMA Kota Padang*. Padang: STKIP PGRI Sumatera Barat.
- Ulfa, Dinia. 2014. *Meningkatkan Tanggung Jawab Belajar dengan Layanan Konseling Individual Berbasis Self-Management pada Siswa Kelas XI di SMK Negeri 1 Pemalang Tahun Pelajaran 2013/2014*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Usman, Husaini. 2010. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wardati dan Mohammad Jauhar. 2011. *Implementasi Bimbingan dan Konseling di Sekolah.* Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Yuliasuti, Iing. 2007. *Pengaruh Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap terhadap Kinerja Perawat dalam Penatalaksanaan Kasus Flu Burung di R.S.U.P. H. Adam Malik Tahun 2007.* Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.

